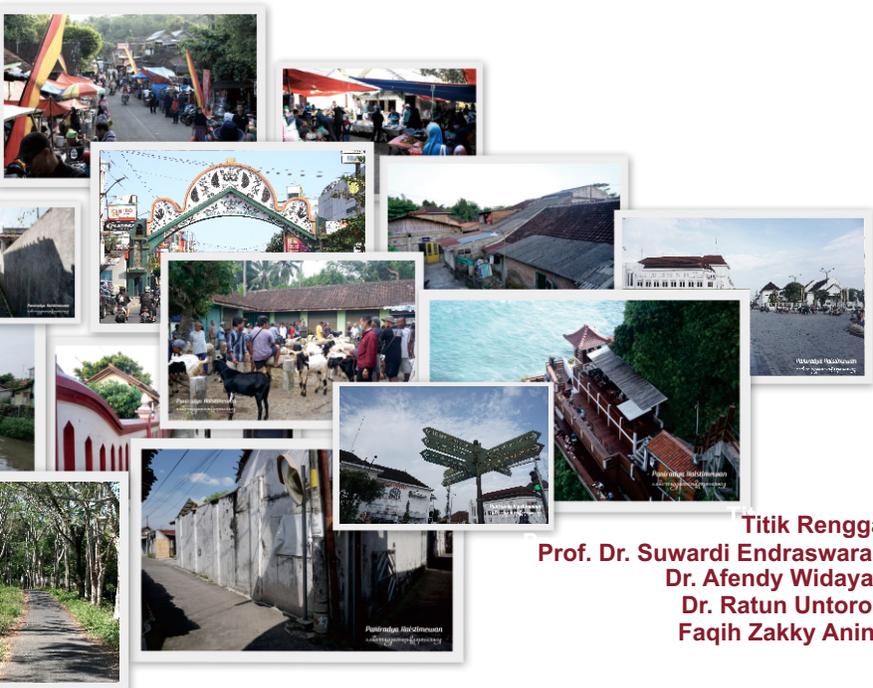


KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

dalam Perspektif

DEMOGRAFI



Titik Renggani, M. M.
Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M. Hum.
Dr. Afendy Widayat, M. Phil.
Dr. Ratun Untoro, M. Hum.
Faqih Zakky Anindita, S. T.

**KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF DEMOGRAFI**

© Titik Renggani, M. M., dkk.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Tim Penulis:

Titik Renggani, M. M.

Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M. Hum.

Dr. Afendy Widayat, M. Phil.

Dr. Ratun Untoro, M. Hum.

Faqih Zakky Anindita, S. T.

Editor: Herlina Setyowati, M. Pd.

Desain Sampul & Layout: M. Qhadafi

Fotografer: Muhammad Athif Nuriana

viii + 156 halaman, 14 cm x 20 cm

ISBN: 978-602-1233-45-0

ISBN 978-602-1233-45-0



Diterbitkan oleh:

Tandabaca Press

Bekerjasama dengan

Paniradya Kaistimewan Yogyakarta

Dicetak oleh:

Tandabaca Kinarya Cipta



Pengantar Penulis

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Atas perkenan-Nya pula, kita senantiasa memperoleh kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat menjalankan berbagai aktivitas kehidupan dengan baik. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan memberikan makna bagi pengembangan diri kita dan bermanfaat untuk masyarakat.

Buku yang berjudul “Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Demografi” merupakan bahan bacaan yang disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami dan tidak membosankan. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan industri pariwisata harus ditangani secara benar dan profesional. *Marketing* industri wisata harus mengerti dan dapat mengembangkan dinamika dari perilaku konsumen. Agar kunjungan wisatawan dapat meningkat, *tourism marketing* maupun *tour guide* harus meningkatkan kemampuan dalam memberikan informasi suatu paket wisata. Dalam hal ini, industri pariwisata harus memastikan

bahwa mereka mampu menyampaikan *value* kepada konsumen. *Value* yang dimaksud seperti, persepsi tentang harga, kualitas, image, dan juga aspek ekonomi dan sosial dari konsumen. Wisatawan dan pelaku di industri pariwisata dianggap sebagai pencipta nilai dan produsen dalam membuat produk sesuai dengan nilai tersebut. Pelaku di industri pariwisata sekarang bukan hanya menyediakan produk akhir tetapi menawarkan solusi atas nilai yang diinginkan konsumen agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.

Buku ini menyajikan gambaran tentang demografi wisata di Yogyakarta dan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam membuat suatu objek wisata jangan hanya meniru suatu daerah yang sudah laku, tetapi bagaimana suatu objek wisata dapat memberikan manfaat dan daya guna bagi masyarakat lokal.

Buku ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini sangat dinantikan. Harapan penulis, semoga buku ini dapat menambah cakrawala wacana keistimewaan Yogyakarta dari perspektif wisata budaya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Penulis

Pengantar Paniradya Pati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, tiada sanjungan dan pujian yang berhak diucapkan selain kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku “Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Demografi” ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Buku ini menyajikan gambaran mengenai demografi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan manusia dan wisata yang ada di Yogyakarta. Dalam perkembangannya perekonomian di Yogyakarta lebih banyak ditunjang dari segi pariwisata, jasa, dan industri kreatif yang menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu tujuan pariwisata utama di Indonesia.

Buku ini berisi sekumpulan informasi mengenai perkembangan transisi demografis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi cikal bakal perubahan dan perkembangan karakteristik populasi masyarakat di wilayah Yogyakarta agar mampu memelihara kebudayaan dan menciptakan pengembangan inovasi wisata yang terwujud dalam empat pilar yaitu kebudayaan, pariwisata, preneur, pemberdayaan perempuan, sehingga kelak dapat mewujudkan pertumbuhan

ekonomi dalam masyarakat dan menjadi salah satu pendukung keistimewaan Yogyakarta, yang perlu diketahui, dimengerti dan dipelajari oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim penulis, Ibu Titik Renggani, S.E., M.M., Bapak Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum., Bapak Dr. Afendy Widayat, M.Phil., Bapak Dr. Ratun Untoro, M.Hum., Bapak Faqih Zakky Anindita, S.T., yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyusun buku ini. Kepada editor dan layouter Ibu Herlina Setyowati, M.Pd. dan Bapak M. Qhadafi kami haturkan terima kasih. Kepada saudara Muhammad Athif Nuriana selaku fotografer dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan terimakasih.

Demikian juga kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun, tentunya sangat kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paniradya Pati,



Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si.

Daftar Isi

Pengantar Penulis	iii
Pengantar Paniradya Pati	v
Daftar Isi	vii
BAB I	
PROFIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1
A. Geografi DIY	4
B. Topografi, Geologis, Hidrologis, dan Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta	27
BAB II	
TRANSISI DEMOGRAFI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	39
B. Transisi Demografi Kota Yogyakarta	42
C. Transisi Demografi Kabupaten Bantul	44
D. Transisi Demografi Kabupaten Sleman	53
E. Transisi Demografi Kabupaten Kulon Progo	55
F. Transisi demografi Kabupaten Gunungkidul	59
BAB III	
MEMBANGUN MANUSIA DI YOGYAKARTA	67
A. Dinamika Pertumbuhan penduduk Yogyakarta	70
B. Dinamika Pembangunan Manusia Tahun 2000–2022	74
BAB IV	
BONUS DEMOGRAFI YOGYAKARTA	97
A. Jumlah Penduduk DIY	98

B. Pertumbuhan Penduduk	101
C. Penyebaran Penduduk Yogyakarta	104
D. Usia Harapan Hidup	109

BAB V

DEMOGRAFI WISATAWAN **115**

A. Inovasi Penciptaan Produk Wisata	120
B. Fasilitas Pendukung/ Daya Tarik objek wisata	129
C. Kualitas Paket Wisata Variatif	137
D. Peningkatan Kunjungan Wisatawan	142
E. Kesejahteraan Masyarakat Lokal di DTW	148

Daftar Pustaka **154**

BAB I

PROFIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdirinya Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Perjanjian Giyanti berisi “Kerajaan Mataram dibagi dua, yakni: setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta dan setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi”. Dalam perjanjian itu pula Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Alaga Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ing Tanah Jawa. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya (Pangeran Mangkubumi), meliputi: Pajong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede, dan ditambah daerah mancanegara yaitu: Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, dan Grobogan.

Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan ibu kota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, di mana telah ada sebuah desa kecil bernama *Pachetokan*. Di sana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati yang dulu dibuat oleh Susuhunan Pakubuwana II dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut, diumumkan Sultan Hamengku Buwana segera memerintahkan kepada rakyat membat hutan Beringin untuk didirikan keraton. Sebelum keraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwana I berkenan menempati pesanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Secara resmi pesanggrahan Ambarketawang ditempati pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan keraton yang sedang dikerjakan.



Gambar 1. Tugu Golong Gilig

Setahun kemudian, Sultan Hamengku Buwana I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmianya. Dengan demikian, berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwana untuk berpindah menetap di keraton yang baru. Peresmianya terjadi tanggal 7 Oktober 1756. Sri Sultan Hamengku Buwana I membangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code. Lokasi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut tampak strategis dari segi pertahanan keamanan pada waktu itu.



Gambar 2. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: www.pinhome.id/blog/peta-yogyakarta

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi DIY dari Presiden RI. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwana IX mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kasultanan dan Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional (Roem, 1982).

A. Geografi DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak di antara 7.33-8.12 Lintang Selatan dan 110.00-110.50 Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.133,15 km atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup wilayah seluas 3.170,645 km² (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023) yang terdiri atas:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 577,22 km² (18,21%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 511,706 km² (16,14%);
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.475,147 km² (46,53%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 573,749 km² (18,10%);
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,819 km² (1,04%).

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang mempunyai wilayah paling luas di Yogyakarta hampir 50%, tepatnya 46,53% dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Batas wilayah

D.I. Yogyakarta adalah salah satu dari 38 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. D.I. Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Samudra Hindia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut



Gambar 3. Pilar batas sebelah timur Provinsi DIY dengan Jawa Tengah

2. Karakteristik wilayah

Yogyakarta adalah sebuah kota di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Karakteristik wilayah Yogyakarta mencakup:

- a. Budaya: Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kehidupan budaya yang kaya seperti seni tari, seni musik, dan kerajinan tangan masih sangat terjaga

di wilayah ini. Salah satu keunikan budaya di Yogyakarta adalah adanya keraton atau istana yang masih berfungsi hingga saat ini.

- b. Pariwisata: Yogyakarta memiliki banyak objek wisata yang menarik. Beberapa objek wisata yang terkenal di Yogyakarta antara lain: Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, Malioboro, Tamansari, Gunung Api Purba Nglageran, Gua Pinjul, Pantai Parangtritis, dan sebagainya.
- c. Geografis: Yogyakarta terletak di dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah dataran rendah di Yogyakarta terdiri dari tanah berpasir yang subur, sementara dataran tinggi di Yogyakarta merupakan area pegunungan yang cocok untuk berkebun.
- d. Iklim: Iklim di Yogyakarta adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata di Yogyakarta sepanjang tahun berkisar antara 25°C hingga 30°C. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika RI, suhu udara rata-rata di D.I. Yogyakarta tahun 2022 menunjukkan angka 27,5°C (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023).
- e. Pendidikan: Yogyakarta merupakan kota pendidikan yang terkenal di Indonesia. Terdapat beberapa perguruan tinggi negeri ternama, seperti: Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang telah menghasilkan banyak lulusan yang berkualitas. Adapun perguruan tinggi swasta ternama di Yogyakarta antara lain: Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Sanata Dharma (USD),

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), dan sebagainya.

3. Demografi wilayah

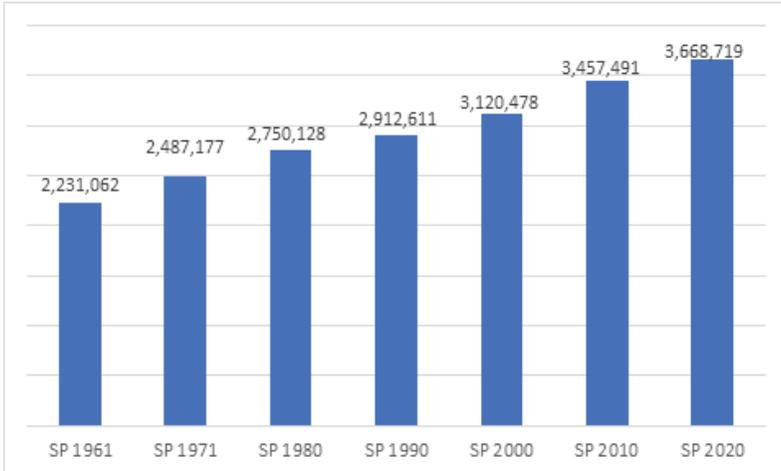
Demografi wilayah D.I Yogyakarta merupakan karakteristik penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk, distribusi, komposisi, pertumbuhan, dan struktur populasi di D.I. Yogyakarta. Demografi wilayah mencakup berbagai aspek, termasuk usia, jenis kelamin, etnisitas, pendidikan, pekerjaan, migrasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi profil populasi. Pada dasarnya, demografi wilayah membantu dalam memahami bagaimana populasi suatu wilayah berubah seiring waktu dan bagaimana karakteristik populasi tersebut memengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik wilayah tersebut. Informasi demografi wilayah dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan populasi.

Demografi wilayah dapat menganalisis perbedaan demografis antara wilayah-wilayah di dalam satu negara atau di antara negara-negara yang berbeda. Melalui pemetaan, grafik, tabel, dan model statistik, para demografer dapat memberikan wawasan tentang pola dan tren demografi yang terjadi di suatu wilayah, serta memberikan dasar untuk merencanakan masa depan yang berkelanjutan dan efektif.

Secara singkat, demografi wilayah adalah studi tentang populasi di suatu wilayah tertentu yang mencakup analisis dan interpretasi data demografis untuk memahami karakteristik penduduk, perubahan populasi, dan implikasinya terhadap wilayah tersebut. Penduduk Yogyakarta berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 3.668.719 jiwa, perkembangan

penduduk Yogyakarta dari hasil sensus tahun 1961 hingga terbaru dapat dilihat sebagai berikut.

Jumlah Penduduk Yogyakarta berdasarkan Sensus Penduduk 1961–2020



Gambar 4. Jumlah Penduduk Yogyakarta
Sumber: BPS Propinsi D.I. Yogyakarta, 2023

- Berdasarkan SP2020, Jumlah Penduduk D.I Yogyakarta September 2020: 3.668.719 orang
- Dengan luas daratan D.I Yogyakarta sebesar 3.185,80 km², maka kepadatan penduduk D.I Yogyakarta sebanyak 1.151,58 orang per km²
- Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk D.I Yogyakarta: 0,58%

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni) berjumlah sekitar 3.761 ribu jiwa. Kepadatan penduduk per km² sebesar 1,2 ribu jiwa/km². Adapun rasio jenis kelamin adalah 98,02. Dari total penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022, kelompok umur yang

berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah sekitar 283,49 ribu jiwa.

Jumlah penduduk tahun 2022 yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sekitar 1,15 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sekitar 378,9 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 2020-2022 yang paling tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo dengan laju pertumbuhan 1,94%, sedangkan laju pertumbuhan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 0,81%.

Tabel 1. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk Yogyakarta

Kab/Kota	Populasi		Pertumbuhan penduduk	
	2020	2022	2010-2020	2020-2022
Kulon Progo	436.395	451.342	1,12	1,94
Bantul	985.770	1.013.170	0,76	1,58
Gunungkidul	747.161	770.883	0,98	1,8
Sleman	1.125.804	1.147.562	0,29	1,1
Yogyakarta	373.589	378.913	-0,38	0,81

Sumber: Provinsi D.I. Yogyakarta dalam Angka 2023

a. Kota Yogyakarta

1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 378.913 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023). Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Jumlah penduduk paling banyak yakni di Kemantren Umbulharjo, sedangkan paling sedikit Kemantren

Pakualaman. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh luas wilayah, di mana Kemantren Umbulharjo memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Kemantren lain. Begitu pula sebaliknya, Kemantren Pakualaman walaupun berada di bagian tengah Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit, memiliki luas wilayah yang lebih kecil. Pola yang sama juga ditunjukkan jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta cenderung meningkat setiap tahunnya.



Gambar 5. Gang sempit di wilayah Sayidan dan Ratmakan Gondomanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta pada 2012–2016 yaitu 1,46% (RPJMD Kota Yogyakarta 2017–2022), sedangkan pada tahun 2020–2021 sebesar 0,98% (Murwati, 2022). Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat berkaitan dengan tinggi atau rendahnya pertumbuhan penduduk alami maupun migrasi penduduk.

2) Rasio jenis kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebesar 94,91%, menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki (Murwati, 2022).

b. Kabupaten Sleman

1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 sebanyak 1.147.562 jiwa (Muslim, et al. 2023). Jumlah penduduk di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk terbanyak dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta. Jumlah penduduk paling banyak yakni di Kapanewon Depok, sedangkan paling sedikit Kapanewon Cangkringan. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di Kabupaten Sleman dipengaruhi kepadatan penduduk, Kapanewon Depok memiliki wilayah 6,18% dari total luas Kabupaten Sleman, sedangkan Kapanewon Cangkringan sebesar 8,35% merupakan kapanewon terluas di wilayah Sleman (Lestanti, Roserina, Wintolo, Bumi, & Saputra, 2022). Jumlah penduduk Kabupaten Sleman cenderung meningkat setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman pada kurun waktu 2020–2022 sebesar 1,1%. Angka ini lebih besar dibanding kurun waktu tahun 2010–2020 di

mana laju pertumbuhan sebesar 0,29% (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023). Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.



Gambar 6. Gang sempit di Papringan Sleman

2) Rasio jenis kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah sebesar 98,76% (SP 2020), sedangkan tahun 2022 sebesar 98,55% (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023) menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

c. Kabupaten Bantul

1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebanyak 1.013.170 jiwa (Muslim, et al. 2023). Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Jumlah penduduk

paling banyak yakni di Kapanewon Banguntapan, sedangkan paling sedikit Kapanewon Kretek. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dipengaruhi kepadatan penduduk dan luas wilayahnya.



Gambar 7. Gang sempit di Jagalan, Bantul

Kapanewon di Kabupaten Bantul yang mempunyai kepadatan penduduk di atas 4.000 jiwa, yakni: Kapanewon Banguntapan sebesar 4.460 jiwa per km² dan Kapanewon Sewon sebesar 4.113 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk paling kecil yakni Kapanewon Dlingo sebesar 716 jiwa per km². Jumlah penduduk Kabupaten Bantul cenderung meningkat setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2020–2022 sebesar 1,58%. Angka ini lebih besar dibanding kurun waktu tahun 2010–2020 di mana laju pertumbuhan sebesar 0,76% (Muslim, et al. 2023). Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

2) Rasio jenis kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan

jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 99,25% (SP 2020), sedangkan tahun 2022 sebesar 99,04% (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023) menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

d. Kabupaten Kulon Progo

1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 sebanyak 451.342 jiwa (Muslim, et al. 2023) dengan jumlah laki-laki sebanyak 223.328 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 228.014 (Setyawan, Kushadi & Marwati 2023). Jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Jumlah penduduk paling banyak yakni di Kapanewon Pengasih, sedangkan paling sedikit Kapanewon Girimulyo. Kapanewon Pengasih memiliki wilayah 10,52% dari total luas Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Girimulyo sebesar 9,36%, dan Kapanewon Wates sebesar 5,46% merupakan kapanewon tersempit di wilayah Kulon Progo.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman pada kurun waktu 2020–2022 sebesar 1,94%. Angka ini lebih besar dibanding kurun waktu tahun 2010–2020 di mana laju pertumbuhan sebesar 1,12% (Muslim, et al. 2023). Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

2) Rasio jenis kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. *Sex ratio* Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 adalah sebesar 98%

(SP 2020), sedangkan tahun 2022 sebesar 98% (Setyawan, Kushadi & Marwati 2023) menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

e. Kabupaten Gunungkidul

1) Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 sebanyak 770.883 jiwa (Muslim, et al. 2023), terdiri atas 380.635 jiwa laki-laki dan 390.248 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kapanewon Wonosari dengan jumlah penduduk sebesar 90.296 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 sebesar 518.99 jiwa/km². Kapanewon dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kapanewon Wonosari dengan kepadatan penduduk sebesar 1.195,82 jiwa/km² (Kurniawan, Umam, Firdausya, Tyas, & Qarina, 2023).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 2020–2022 sebesar 1,8%. Angka ini lebih besar dibanding kurun waktu tahun 2010–2020 dimana laju pertumbuhan sebesar 0,98% (Muslim, et al. 2023).

2) Rasio jenis kelamin

Sex ratio Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah sebesar 97,75% (SP 2020), sedangkan tahun 2022 sebesar 97,54% (Kurniawan, Umam, Firdausya, Tyas, & Qarina, 2023) menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

4. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan

a. Perekonomian Yogyakarta

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2022 yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh sebesar 5,15%. Pertumbuhan ini

sedikit melambat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,58%. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar 15,04%, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40% (Statistik, 2023).

Perekonomian Yogyakarta didominasi oleh sektor jasa, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif. Berikut adalah beberapa komponen ekonomi yang penting di Yogyakarta.

1) Pariwisata

Yogyakarta adalah salah satu tujuan pariwisata utama di Indonesia. Keberadaan Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, dan berbagai objek wisata alam menarik lainnya, membuat sektor pariwisata menjadi kontributor utama bagi ekonomi Yogyakarta. Industri ini mencakup berbagai layanan pariwisata, seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan layanan wisata lainnya.

2) Pendidikan

Yogyakarta memiliki sejumlah universitas dan perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia. Pendidikan tinggi menjadi sektor penting dalam ekonomi Yogyakarta, menarik mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Selain itu, pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap industri terkait, seperti perumahan dan transportasi.

3) Industri kreatif

Yogyakarta memiliki industri kreatif yang berkembang pesat, terutama dalam bidang seni, kerajinan tangan, desain, dan musik. Kehadiran komunitas seniman dan pelaku industri kreatif telah menciptakan berbagai produk dan karya seni yang unik, seperti kerajinan batik, lukisan, ukiran kayu, dan desain grafis. Industri ini mendukung

lapangan kerja dan menarik minat wisatawan.

4) Pertanian dan agrobisnis

Meskipun sektor pertanian tidak menjadi kontributor utama bagi ekonomi Yogyakarta, pertanian masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal dan menyediakan lapangan kerja di sektor ini. Sektor agrobisnis juga berkembang dengan produksi buah-buahan, sayuran, dan produk pertanian lainnya.

5) Industri manufaktur dan pengolahan

Yogyakarta memiliki beberapa industri manufaktur, termasuk produksi makanan dan minuman, tekstil, dan kerajinan. Meskipun sektor manufaktur tidak sebesar sektor jasa, tetapi tetap memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Perekonomian Yogyakarta terus berkembang dengan potensi yang kuat dalam sektor-sektor tersebut. Kombinasi antara pariwisata, pendidikan, industri kreatif, pertanian, dan manufaktur memberikan keberagaman ekonomi yang memperkuat pertumbuhan wilayah ini.

b. Ketenagakerjaan

Dari total penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 3.668.719 jiwa, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 20–24 tahun dengan jumlah sekitar 283.490 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2022 yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sekitar 1.147.562 jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sekitar 378.913 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 2020–2022 yang paling tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo dengan laju pertumbuhan 1,94%, sedangkan laju pertumbuhan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 0,81%.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menganggur di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar 94.945 orang, dari total angkatan kerja sejumlah 2,33 juta orang. Komposisi jenis kelamin pada kelompok pengangguran terbuka adalah 53,14% laki-laki dan 46,86% perempuan. Jumlah pengangguran terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta di atas 15 tahun yang menganggur paling tinggi adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA) yaitu 46 ribu orang. Jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja paling banyak mempunyai status buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah 962,18 ribu orang, sedangkan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dengan jumlah 82,67ribu orang.

Di Kabupaten Sleman pendapatan bersih sebulan pekerja informal lebih besar dibandingkan di kabupaten/kota lain di Yogyakarta. Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal per bulan di kabupaten/kota se Provinsi D.I. Yogyakarta berkisar di atas Rp 1.000.000,- per bulan, hanya di Kabupaten Gunungkidul yang masih di bawah Rp 1.000.000,- (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023).

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi perkembangan sumber daya manusia, terutama untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan hal tersebut, permintaan jasa pendidikan turut meningkat sehingga dibutuhkan ketersediaan penyelenggara pendidikan yang semakin bermutu. Jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK) Sekolah TK di D.I. Yogyakarta sebanyak 2.146 sekolah, terdiri atas: 514 di Kulon Progo, 573 di Bantul, 325 di Gunungkidul, 513 di Sleman, dan 221 di Kota Yogyakarta. Pendidikan dasar (SD) termasuk Madrasah Ibtidaiyah di D.I. Yogyakarta sebanyak 2.047 sekolah, terdiri atas: 370 di Kulon Progo, 408 di Bantul, 549 di Gunungkidul, 551 di

Sleman, dan 169 di Kota Yogyakarta.

Pendidikan menengah pertama (SMP) termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) di D.I. Yogyakarta sebanyak 575 sekolah, terdiri atas: 82 di Kulon Progo, 123 di Bantul, 141 di Gunungkidul, 164 di Sleman, dan 65 di Kota Yogyakarta. Pendidikan menengah atas (SMA) termasuk Madrasah Aliyah (MA), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di D.I. Yogyakarta sebanyak 458 sekolah, terdiri atas: 58 di Kulon Progo, 102 di Bantul, 82 di Gunungkidul, 138 di Sleman, dan 78 di Kota Yogyakarta. Jumlah SMA sebanyak 173, MA sebanyak 73, dan SMK sebanyak 212 sekolah (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Pendidikan Tinggi (PT) baik negeri maupun swasta dan PT di bawah Kementerian Agama di D.I. Yogyakarta sebanyak 126 PT, terdiri atas: 1 di Kulon Progo, 31 di Bantul, 2 di Gunungkidul, 41 di Sleman, dan 51 di Kota Yogyakarta (PDDikti, 2023).

6. Sarana transportasi

Sarana transportasi umum yang dulu pernah beroperasi terutama bus kota seperti Aspada, Kopata, dan sebagainya sudah tergantikan dengan adanya transportasi modern seperti ojek *online*. Sarana transportasi yang masih bertahan sampai saat ini Transjogja. Kendala transportasi Transjogja ini akses jarak halte bus jauh. Waktu menunggu dan perjalanan terlalu lama sehingga masyarakat Yogyakarta lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Yogyakarta sebagai kota wisata menata dirinya sedemikian rupa agar aktivitas wisatawan selama menghabiskan waktu untuk berlibur tidak terhalangi dengan ketidaknyamanan. Sebelum Covid-19 melanda di Yogyakarta, Dinas pariwisata menyediakan sarana transportasi untuk kenyamanan bagi wisatawan yang awam. Sarana transportasi ini dikenal dengan nama “Si Thole”.

Di Yogyakarta, terdapat beberapa sarana transportasi yang dapat digunakan untuk berkeliling dan mencapai berbagai destinasi di dalam dan sekitar kota tersebut. Berikut adalah beberapa sarana transportasi yang umum digunakan di Yogyakarta.



Gambar 8. Bus Jogja Heritage Track



Gambar 9. Sarana transportasi Si Thole
(Sumber: <https://warta.jogjakota.go.id>)

a. TransJogja

TransJogja adalah sistem *bus rapid transit* (BRT) yang menghubungkan berbagai wilayah di Yogyakarta, termasuk pusat kota, stasiun kereta api, dan objek wisata terkenal. Bus ini beroperasi dengan jadwal tetap dan tarif yang terjangkau.

b. Taksi

Taksi tersedia di Yogyakarta dan dapat dipesan melalui telepon atau aplikasi taksi *online*.

c. Ojek

Ojek adalah sepeda motor yang digunakan sebagai sarana transportasi umum di Yogyakarta. Penumpang dapat menggunakan aplikasi ojek *online* seperti: Gojek, Maxim, JogjaKita, Grab, dan sebagainya sehingga memudahkan untuk memesan ojek.

d. Becak

Ada dua jenis becak di Yogyakarta, yakni becak kayu dan

betor (becak motor). Becak tersedia di beberapa daerah di Yogyakarta. Adapun untuk tarif dapat dinegosiasikan antara calon penumpang dengan pengemudi.

e. Sewa mobil/motor

Wisatawan dapat menyewa mobil atau motor di Yogyakarta untuk bepergian secara mandiri. Terdapat beberapa perusahaan yang menyewakan mobil dan motor dengan berbagai jenis kendaraan dengan tarif harian, mingguan, maupun bulanan.

f. Kereta api

Stasiun Tugu di Yogyakarta adalah stasiun kereta api utama yang menghubungkan Yogyakarta dengan kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, dan kota lainnya. Kereta api dapat menjadi pilihan yang nyaman untuk perjalanan jarak jauh.

g. Bus

Bus antar kota yang beroperasi di Terminal Giwangan dan Terminal Jombor.

h. Bandar udara

Terdapat dua bandara di Yogyakarta, yakni: Bandara Adisucipto dan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).

i. Sepeda

Yogyakarta pernah dikenal sebagai kota sepeda pada tahun 1980-an hingga akhir 1990-an. Pada pagi hari dan sore setelah jam kerja, hampir semua jalur jalan di Yogyakarta dipenuhi sepeda sebagai sarana transportasi berangkat dan pulang kerja. Saat ini pengguna sepeda sebagai sarana transportasi mandiri sudah semakin sedikit penggunanya.

7. Pasar modern dan tradisional

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan

kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Sebuah “pasar modern” adalah konsep yang mengacu pada pasar ritel yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dan modern dalam operasinya. Ini adalah bentuk evolusi dari pasar tradisional yang lebih kuno, di mana pedagang menjual barang-barang mereka dalam lingkungan terbuka atau bangunan yang tidak terlalu terorganisir.



Gambar 10. Pasar Modern di Yogyakarta (Superindo)

Di pasar modern akan ditemukan fasilitas yang lebih modern, termasuk struktur bangunan yang dirancang secara profesional, sistem pencahayaan yang baik, ruang yang lebih bersih dan lebih terorganisir, dan peralatan modern seperti pendingin udara, lift, dan eskalator. Pasar modern juga sering menawarkan berbagai jenis produk, mulai dari makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, barang elektronik, peralatan rumah tangga, hingga

produk kecantikan dan perawatan pribadi. Salah satu fitur utama pasar modern adalah adanya penyewa (tenant yang menyewa ruang) untuk menjual produk mereka. Ini berbeda dengan pasar tradisional di mana pedagang mungkin memiliki stan (los) atau tempat mereka sendiri. Penyewa dalam pasar modern seringkali adalah merek atau perusahaan besar yang memiliki toko ritel mereka sendiri dan menyewa ruang di pasar modern sebagai saluran penjualan tambahan.

Beberapa pasar modern juga menawarkan layanan dan fasilitas tambahan, seperti pusat kebugaran, area permainan anak-anak, bioskop, restoran, dan pusat hiburan lainnya. Ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan menyenangkan bagi konsumen. Pasar modern juga sering menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja. Misalnya, mereka dapat memiliki sistem kasir yang otomatis, penggunaan kartu keanggotaan atau aplikasi untuk mendapatkan diskon atau poin loyalitas, serta penggunaan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan.

Pasar modern telah menjadi populer di banyak negara di seluruh dunia, karena mereka menawarkan kenyamanan, pilihan produk yang lebih luas, dan pengalaman berbelanja yang lebih modern dan terorganisir. Mereka juga sering menjadi tujuan wisata belanja yang populer bagi penduduk setempat dan wisatawan. Keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi, tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Yogyakarta saat ini sudah banyak didirikan pasar-pasar modern, seperti; Plaza Ambarukmo, Malioboro Mall, Lippo Plaza, Hartono Mall (Pakuwon Mall sekarang), Galeria Mall, Sahid J-Walk, Jogja Town Square, Sleman City Hall, Jogja City Mall, Superindo,

dan sebagainya. Keberadaan pasar-pasar modern tersebut berdampak terjadinya pergeseran perekonomian masyarakat yang semula di pasar tradisional beralih ke pasar modern. Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar-pasar tradisional. Namun pada masa sekarang ini pasar tradisional seringkali dalam proses jual beli cenderung berkurang jika dibandingkan pada masa di mana belum dibukanya pasar-pasar modern atau supermarket dan minimarket yang cenderung mematikan proses perekonomian pasar tradisional. Tentunya perbandingan ini dipengaruhi karena fasilitas pelayanan dan tempat lebih nyaman dan dijamin ketertibannya jika dibandingkan berbelanja di pasar tradisional yang cenderung panas, berdesak-desakan dan tempat atau lokasi yang kurang memadai.



Gambar 11. Pasar Pawirotaman dan Pasar Beringharjo

Di tengah arus modernitas, keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar mampu bersaing di tengah arus tersebut. Liberalisasi investasi yang makin tidak terbandung telah membuat pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya pasar modern yang menawarkan lebih banyak keunggulan komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang

serba praktis dengan intensitas interaksi yang minim. Begitu pula gaya hidup mereka mengalami perubahan drastis yang selalu mengikuti pola serba modern, seperti makanan mereka, cara mereka berpakaian, yang secara tidak langsung meninggalkan pasar tradisional yang merupakan aset ekonomi daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat dan kebudayaannya yang secara turun menurun.



Gambar 12. Suasana di Pasar Kenteng nanggulan Kulon Progo

Keberadaan pasar tradisional di perkotaan dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern. Pembangunan minimarket dan pasar modern yang ada yang memberikan fasilitas kenyamanan dalam diri masyarakat dapat berdampak negatif pula terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ekonomi rendah yang mendapat penghidupan dari penjualan hasil dagangannya yang tidak terlalu banyak. Hal ini dapat terlihat jelas bagaimana proses pembangunan yang memang memberikan suatu kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung merugikan banyak pihak. Agar keberadaan pasar tradisional tidak semakin ditinggalkan oleh masyarakat, di Yogyakarta mulai dilakukan revitalisasi pasar tradisional yang dikemas dengan sentuhan modern, seperti pasar Pawirotaman dan Beringharjo. Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam era

globalisasi saat ini setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang bak jamur di musim hujan. Pengaruh datangnya pasar modern terhadap pasar tradisional sangat kuat sehingga selalu terjadi pro-kontra antara pelaku bisnis retail modern.



Gambar 13. Proses jual beli di Pasar Ngino Seyegan Sleman

Pasar tradisional yang khas dengan keramahtamahan dan kehangatan antara penjual dan pembeli melalui interaksi merupakan cerminan budaya yang ada di pasar tradisional. Hal ini karena hanya di pasar tradisional terjalin interaksi langsung antara penjual dengan pembeli. Tidak membuat heran saat hati penjual luluh setelah terjadi saling tawar menawar antara pembeli dengan penjual sehingga terjadi kesepakatan harga.



Gambar 14. Pasar tradisional Jepitu Girisubo Gunungkidul

Hal yang khas di pasar tradisional yakni, produk, sayur-sayuran, dan lain sebagainya masih ada yang diproduksi dan dipasarkan oleh penjualnya sendiri sehingga tidak mengherankan budaya tawar menawar yang ada di pasar tradisional masih sering ditemukan dewasa ini.

Di pasar tradisional juga akan diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Berkumandangnya lagu Indonesia Raya di pasar-pasar tradisional Yogyakarta didasarkan surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwana X Nomor 26/SE/V/2021 tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Berdasarkan surat edaran tersebut maka setiap hari di pasar-pasar tradisional akan diputar lagu kebangsaan Indonesia melalui sound system.



Gambar 15. Aktivitas pedagang di Pasar Niten Bantul

B. Topografi, Geologis, Hidrologis, dan Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Topografi

Yogyakarta adalah suatu wilayah yang berada di sisi selatan Pulau Jawa. Yogyakarta dikenal karena kaya warisan budaya dan situs bersejarah. Topografi Yogyakarta ditandai dengan kombinasi dataran datar dan lanskap vulkanik. Dataran yang subur terutama digunakan untuk tujuan pertanian, dengan sawah menjadi pemandangan umum. Dataran ini dilalui oleh beberapa

sungai: Sungai Progo, Sungai Winongo, Sungai Opak, dan Sungai Code, yang menyediakan air untuk irigasi dan mendukung kegiatan pertanian di wilayah tersebut.

Wilayah Yogyakarta dengan lanskap berbukit dan bergelombang dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi dan formasi gunung api purba. Salah satu fitur vulkanik yang menonjol adalah Gunung Merapi, sebuah gunung berapi aktif yang terletak di bagian Yogyakarta. Gunung Merapi dikenal karena sering meletus dan merupakan tujuan populer bagi pendaki gunung dan pencinta alam.

Selain Gunung Merapi, ada daerah perbukitan lainnya yakni, Perbukitan Menoreh dan Pegunungan Seribu (Gunungkidul). Secara keseluruhan, topografi Yogyakarta menggabungkan dataran datar dengan fitur vulkanik, menyediakan lingkungan yang beragam dan indah. Geografi yang unik ini, ditambah dengan warisan budayanya, menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan wisata populer di Indonesia.

DIY terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan gunung berapi. Spesifikasi dataran di DIY ditunjukkan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kondisi Topografis Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Dataran	Luas (km ²)	Ketinggian (mdpl)
1	Pegunungan selatan	1.656,25	150-700
2	Gunung berapi Merapi	582,81	80-2.911
3	Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo	215,62	0-80
4	Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah selatan	708,25	0-572

Sumber: DIY dalam Angka 2018, BPS DIY, 2018

Kondisi topografi di DIY beraneka ragam, mulai dari berbentuk dataran, lereng, pegunungan, serta daerah pantai. Secara topografi, DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan wilayah sebagai berikut.

- a. Satuan Gunung Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung berapi hingga dataran fluvial gunung berapi termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung berapi merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunung berapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.
- b. Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunung Kidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam karst yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (Wonosari Basin) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik (Harriyadi, 2020), sehingga terbentuk menjadi *plato* Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang. Kondisi lingkungan Cekungan Wonosari berubah seiring dengan berjalannya waktu. Cekungan Wonosari pada saat ini identik dengan kelangkaan air karena terbatasnya sumber daya air permukaan (Sudarmadji, Suprayogi, Widyastuti, & Harini, 2011)

- c. Satuan Pegunungan Kulon Progo (Perbukitan Menoreh), yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil. Denudasional adalah serangkaian proses panjang yang menghasilkan erosi pada permukaan bumi yang mengakibatkan berkurangnya ketinggian dan relief lanskap dan juga lanskap bumi.
- d. Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan marine dan aeolin yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan marine dan aeolin di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumpuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antarwilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, dan Banguntapan) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang.

Dua daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar di DIY adalah DAS Progo di barat dan DAS Opak-Oya di timur. Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.



Gambar 16. Daerah Aliran Sungai di Kota Yogyakarta

2. Geologis Yogyakarta

Sebagian wilayah Yogyakarta terletak di daerah dataran aluvial Gunung Merapi. Material utama penyusunnya adalah dari material Gunung Merapi yang tersedimentasi setelah melalui aliran Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Winongo. Berasal dari proses vulkanik (erupsi gunung berapi), sebagian wilayah Yogyakarta memiliki jenis tanah berupa tanah regosol, sementara formasi geologi berupa batuan sedimen *old andesit*. Dalam klasifikasi tanah menurut sistem taksonomi tanah *United States Department of Agriculture* (USDA, 1975), jenis tanah regosol termasuk dalam ordo *entisol*

atau *inseptisol*. Ciri-ciri jenis tanah regosol yaitu tanah muda, baik tingkat permulaan (*entisol*) atau telah lebih berkembang (*Inseptisol*) yang belum mengalami perkembangan lanjut, bertekstur kasar, cenderung gembur, peka terhadap erosi, kemampuan menyerap air yang tinggi, dan bersifat cukup subur karena kaya akan unsur hara. Formasi geologi berupa batuan sedimen *old andesit* (endapan vulkanik tua) juga merupakan hasil material vulkanik yang terendapkan, dengan jenis andesit (batuan beku vulkanik).

Kondisi tanah di DIY sangat bervariasi, antara lain terdiri dari tanah alluvial lithosol, regosol, rensia, grumosol, mediteran, dan lhathosol. Spesifikasi kondisi tanah di DIY ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Jenis Tanah di DIY

No.	Jenis Tanah	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Alluvial	101,74	3,19
2	Lithosol	1.052,93	33,05
3	Regosol	863,06	27,09
4	Rensia	78,83	2,48
5	Grumosol	349,95	10,97
6	Mediteran	345,40	10,84
7	Lhathosol	394,49	12,38
Jumlah		3.186,40	100

Sumber: BPS DIY, 2018

Di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara geologis, Gunungkidul dicirikan oleh lanskap karst batu kapur, sungai bawah tanah, dan sistem gua. Wilayah ini terletak di dataran tinggi batu kapur yang dikenal sebagai Gunung Sewu Karst. Kawasan karst ini membentang di beberapa kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Batu kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi organisme laut selama jutaan

tahun. Gunungkidul terkenal dengan formasi karstnya, yang telah menciptakan fitur unik seperti tebing, lubang pembuangan (doline), sungai bawah tanah, dan gua. Bentang alam karst di Gunungkidul adalah hasil dari ribuan tahun erosi kimia yang disebabkan oleh pelarutan batu kapur oleh air. Karst batu kapur Gunungkidul juga berkontribusi terhadap sumber daya air di kawasan ini. Sifat berpori batu kapur memungkinkan air hujan meresap ke dalam tanah, mengisi kembali akuifer bawah tanah. Akuifer ini merupakan sumber air tawar yang penting bagi masyarakat setempat dan mendukung pertanian di wilayah tersebut.

Lanskap karst di Gunungkidul rapuh dan rentan terhadap aktivitas manusia. Eksploitasi air tanah yang berlebihan, penggalian batu kapur yang tidak diatur, dan pembuangan limbah yang tidak tepat dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan runtuhnya formasi karst. Upaya sedang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan geologi unik Gunungkidul. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, telah menerapkan langkah-langkah untuk mengelola dan mengembangkan lanskap karst secara berkelanjutan sambil mempromosikan ekowisata dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan.

Perbukitan Menoreh adalah sebuah rangkaian perbukitan yang terletak di sebelah barat laut Yogyakarta, membentang sejauh sekitar 70 kilometer. Secara geologis, Perbukitan Menoreh terdiri dari batuan sedimen yang lebih tua dibandingkan dengan batuan vulkanik yang mengelilinginya. Perbukitan Menoreh terbentuk dari endapan sedimen laut yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Batuan yang dominan di wilayah ini adalah batu pasir, batu lempung, dan batu gamping. Terdapat pula lapisan batuan yang lebih tua seperti batuan kapur Jura, yang terbentuk sekitar 150 juta tahun yang lalu.

Selama proses tektonik, terjadi pengangkatan perbukitan ini sehingga menciptakan topografi yang berbukit-bukit. Perbukitan Menoreh memiliki ketinggian yang bervariasi, dengan beberapa puncak yang mencapai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Perbukitan Menoreh memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi, dengan hutan tropis dan lahan pertanian yang tersebar di wilayah ini. Lereng-lereng perbukitan ditutupi oleh vegetasi seperti pohon mahoni, akasia, dan beberapa jenis tumbuhan endemik.

3. Hidrologis Yogyakarta

Kondisi hidrologi Yogyakarta secara umum dipengaruhi oleh tujuh aliran sungai. Sungai tersebut antara lain: Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Opak, dan Sungai Oya. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun dengan debit aliran yang bervariasi. Kondisi aliran tersebut dipengaruhi oleh tingginya curah hujan di bagian hulu, topografi, dan tanah



Gambar 17. Salah satu DAS di Yogyakarta

yang memiliki permeabilitas tinggi. Aliran dasar (*baselow*) dari air tanah cukup tinggi, sehingga dapat mendukung aliran air sungai pada musim kemarau. Selain air permukaan, kondisi air tanah juga memengaruhi kondisi hidrologi di Yogyakarta. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan muka freatik, di mana permukaan freatik merupakan batas zona jenuh air dengan zona tidak jenuh air. Akuifer lereng merapi dibagi menjadi empat zona, yakni (1) zona akuifer bagian utara, (2) zona akuifer bagian tengah, (3) zona akuifer bagian selatan, serta (4) zona akuifer wates dan gumuk pasir. Potensi air tanah tinggi karena terdapat pada daerah cekungan Yogyakarta.

Potensi sumber daya air permukaan yang tersedia di DIY meliputi debit sungai, bendung air, dan air tanah. Di Kabupaten Gunungkidul, selain aliran sungai, sumber daya air permukaan juga berupa genangan atau telaga. Kawasan resapan air terletak di lereng Gunung Merapi, meliputi wilayah Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngemplak, dan sekitarnya.

Tabel 4. Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sungai	Panjang Aliran (km)	Kabupaten/ Kota yang Dilewati
1	Code	32	Sleman, Bantul, Yogyakarta
2	Opak	35	Sleman, Bantul
3	Progo	43	Sleman, Kulon Progo
4	Gajah Wong	20	Sleman, Bantul, Yogyakarta
5	Winongo	43	Sleman, Bantul, Yogyakarta
6	Serang	29	Kulon Progo

Sumber: DIY dalam Angka 2018, BPS DIY, 2018

4. Klimatologis Yogyakarta

Iklim Yogyakarta (Fatma, 2017) adalah iklim tropis basah dan kering (klasifikasi iklim Köppen Aw). Iklim ini dipengaruhi oleh posisi geografisnya yang berada di wilayah tropis dan dekat dengan Samudra Hindia. Berikut adalah beberapa ciri klimatologi Yogyakarta.

a. Musim kemarau (April hingga September)

Musim kemarau di Yogyakarta cenderung kering dengan cuaca yang cerah dan sedikit hujan. Suhu rata-rata selama musim ini berkisar antara 26°C hingga 34°C. Kadang-kadang, angin kering dari timur atau tenggara, yang dikenal sebagai “angin barat daya,” dapat memberikan sensasi panas yang lebih tinggi.

b. Musim hujan (Oktober hingga Maret)

Musim hujan di Yogyakarta membawa curah hujan yang lebih tinggi. Bulan-bulan ini dapat memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan sering terjadi hujan lebat. Suhu selama musim hujan berkisar antara 23°C hingga 31°C. Bulan Januari dan Februari umumnya menjadi puncak musim hujan dengan curah hujan yang lebih tinggi.

c. Suhu tahunan

Suhu tahunan rata-rata di Yogyakarta berkisar antara 24°C hingga 32°C. Suhu jarang jatuh di bawah 20 derajat Celsius.

d. Kelembapan

Yogyakarta memiliki kelembapan yang relatif tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata kelembapan sekitar 75% hingga 85%. Kelembapan dapat lebih tinggi selama musim hujan.

e. Curah hujan

Curah hujan tahunan di Yogyakarta adalah sekitar 2.000 hingga 2.500 milimeter. Bulan-bulan dengan curah hujan tertinggi biasanya terjadi antara November dan Januari.

Yogyakarta cenderung mengalami perubahan musim yang cukup jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Namun, perubahan iklim global dapat memengaruhi pola cuaca secara umum. Oleh karena itu, cuaca dan iklim dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Masyarakat disarankan untuk memeriksa perkiraan cuaca terkini saat merencanakan kunjungan ke Yogyakarta.

Tabel 5. Kondisi Iklim di Yogyakarta 2020–2022

Unsur Iklim	2020	2021	2022
Suhu (°C)			
Minimum	17,30	18,0	18,7
Rata-rata	28,00	27,8	27,5
Maksimum	35,50	33,6	33,9
Kelembapan (%)			
Minimum	45,00	41	45,0
Rata-rata	78,00	76,3	78,2
Maksimum	100,00	99	100,0
Kecepatan Angin (m/det)			
Minimum	<i>calm</i>	<i>calm</i>	0,0
Rata-rata	1,90	3,9	3,4
Maksimum	10,28	15	18,0
Tekanan Udara (mbar)			
Minimum	900,40	900,3	929,4
Rata-rata	989,60	989,5	989,0
Maksimum	999,10	1009,5	1007,6
Jumlah Curah Hujan (mm)	3057,80	2456,7	3161,2
Jumlah Hari Hujan (hari)	181	195	214
Penyinaran Matahari (%)	68,75	5,4	4,5

Sumber: Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di D.I. Yogyakarta

Pada tahun 2022, curah hujan terbesar terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada bulan November yaitu 803 mm³ dan paling rendah di Kabupaten Bantul pada bulan Juli dan di Gunungkidul pada bulan September yaitu 26,50 mm³. Adapun jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Kabupaten Bantul pada bulan Maret sebanyak 28 hari.

BAB
II

TRANSISI DEMOGRAFI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Transisi Demografi Daerah Istimewa Yogyakarta

Transisi demografi adalah perpindahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi ke tingkat yang lebih rendah (Suwito, 2020). Transisi demografi menjelaskan terjadi perubahan populasi dari waktu ke waktu (Alfana, Adlina & Rohmah, 2019). Perubahan tersebut terjadi akibat adanya perkembangan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, sosial sehingga terjadi perubahan di tingkat kelahiran, kematian hingga harapan hidup.

Tahapan transisi demografi tersebut ada 3 (Suwito, 2020) yaitu: pratransi, transisi, dan pasca transisi, sebagai berikut.

1. Tahap pratransi (*pretransitional*)

Tahap ini dengan ciri-ciri tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi sehingga tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, atau mungkin hampir mendekati 0% per tahun. Pada masa pratransi ini diperkirakan terjadi sebelum tahun 1650. Pada

tahap ini belum ada usaha-usaha untuk mengendalikan kelahiran meskipun kelahiran sangat tinggi. Demikian pula dengan melihat kondisi kesehatan yang buruk akibat berbagai hal termasuk kondisi ekonomi yang belum baik sehingga menyebabkan tingkat kematian tinggi termasuk tingkat kematian bayi. Kondisi ini tentu menyebabkan masyarakat tidak tergerak menurunkan kelahirannya.

2. Tahap transisi (*transitional*)

Tahap ini dicirikan oleh penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat kematian lebih rendah daripada tingkat kelahiran mengakibatkan tingkat pertumbuhan penduduk dalam kategori sedang atau tinggi. Pada tahap transisi ini dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Permulaan transisi, yang dicirikan oleh tingkat kematian menurun tetapi tingkat kelahiran tetap tinggi. Dengan tingkat kematian yang menurun dan tingkat kelahiran yang masih tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi sedang atau tinggi.
- b. Tahap pertengahan transisi, yang dicirikan oleh tingkat kelahiran dan kematian sama-sama menurun, tetapi tingkat kematian menurun lebih cepat daripada tingkat kelahiran sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dalam kondisi sedang atau tinggi.
- c. Tahap akhir transisi, yang dicirikan tingkat kematian sudah rendah sehingga menurun sedikit lagi atau bahkan mungkin tidak berubah, sedangkan angka kelahiran antara sedang dan rendah.

3. Tahap pasca transisi (*post transitional*)

Tahap ini dicirikan oleh tingkat kematian dan kelahiran kedua-duanya rendah. Hampir semuanya mengetahui cara-cara kontrasepsi dan dipraktikkan. Tingkat kelahiran dan kematian (*vital rates*) mendekati keseimbangan. Pertumbuhan penduduk

sangat rendah dalam jangka waktu yang panjang.

Proses penurunan kelahiran dan kematian tidaklah sesederhana seperti yang disampaikan dalam model transisi demografi/vital yang telah disampaikan. Ada perbedaan kondisi-kondisi di berbagai negara. Di Eropa penurunan tingkat mortalitas disebabkan oleh meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia penurunan mortalitas terutama disebabkan oleh efektivitas penggunaan obat-obat modern dan antibiotika. Demikian juga penurunan tingkat fertilitas/kelahiran di negara-negara sedang berkembang lebih disebabkan oleh penggunaan alat kontrasepsi yang mantap. Pemerintah Indonesia memang serius terhadap persoalan kependudukan tersebut sehingga penurunan kelahiran menjadi lebih cepat daripada di negara-negara maju.

Di Indonesia program keluarga berencana sangat gencar dilaksanakan mulai sekitar tahun 1970-an yang mengakibatkan penurunan tingkat kelahiran secara cepat di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula berbagai program kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak yang mengintervensi penurunan dengan cepat angka kematian bayi, anak, dan kematian ibu. Program perbaikan gizi untuk balita dilaksanakan dengan baik untuk menurunkan angka kematian anak.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang telah berada pada tahapan akhir transisi demografi (Alfana, Dewi & Wahyudi, 2018). Hal ini terlihat dari sudah rendahnya indikator fertilitas dan mortalitas di DIY. Hasilnya, struktur penduduk di DIY jika dilihat dari piramida penduduk adalah pendeknya sayap piramida pada usia 0-14, panjangnya sayap piramida pada usia 15-65 dan mulai panjangnya sayap piramida pada usia 65+ sebagai cerminan tingginya angka harapan hidup di DIY.

B. Transisi Demografi Kota Yogyakarta

1. Natalitas

Tren pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta cenderung melambat seiring meningkatnya tingkat kesadaran untuk merencanakan kelahiran anak pascapernikahan. Sejauh ini, pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta tercatat di angka 0,81%, dengan jumlah penduduk sekira 3787.913 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023).



Gambar 18. Rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta

Kecenderungan untuk merencanakan melalui program KB sudah semakin populer di tengah masyarakat, sehingga di Kota Yogyakarta rata-rata setiap keluarga memiliki 1,2 anak. Pengendalian penduduk di Kota Yogyakarta di bawah rerata nasional, yakni: 1,12 (<https://bps.go.id>, 2023). Kecenderungan warga masyarakat yang kini makin aktif melaksanakan KB, selaras dengan anjuran pemerintah. Dari total 89 ribu keluarga di Kota Yogyakarta, dengan pasangan usia subur (PUS) sekitar 36 ribu, 54% di antaranya terdaftar sebagai peserta KB. Selain itu juga masih banyak yang menggunakan pola mandiri baik tradisional atau inisiatif memakai alat kontrasepsi yang lain.

Rendahnya angka kelahiran di Kota Yogyakarta bukan karena faktor keengganan punya anak. Akan tetapi, adanya kesadaran perencanaan yang semakin tinggi pascamenikah tidak langsung mempunyai anak, terlihat dari angka kelahiran relatif rendah.

2. Mortalitas

Kematian (mortalitas) adalah salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Angka kematian di Kota Yogyakarta dari tahun 2018–2022 sebagai berikut: 2018 sebanyak 2.735; 2019 sebanyak 4.283; 2020 sebanyak 3.715; 2021 sebanyak 5.838 (Murwati, 2022), sedangkan angka kematian Kota Yogyakarta tahun 2017 sebesar 2.757 (Siruswadi, 2017). Angka kematian pada tahun 2019-2021 relatif lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19. Jumlah kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Selain itu data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/mortalitas lainnya.



Gambar 19. Pemukiman di Sungai Code Yogyakarta

3. Transisi demografi dalam pembangunan

Kebijakan pembangunan kependudukan penduduk Indonesia sebagian besar hidup di daerah perdesaan yang masih memiliki rasa kekeluargaan antarsesama, dengan empat ciri-ciri umum yaitu: jumlah penduduk yang semakin bertambah, sebagian besar penduduk berusia muda, persebaran penduduk tidak merata, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi tiga faktor yaitu semakin meningkatnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dengan ditandai berkurangnya angka kematian bayi, pertumbuhan ekonomi yang mendorong perbaikan gizi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jumlah pengendalian kelahiran.

C. Transisi Demografi Kabupaten Bantul

Bantul menjadi salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 504,47 km² yang terdiri dari 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 pedukuhan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" – 110°31'08" Bujur Timur. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah kabupaten tersebut terdiri dari daerah dataran yang terletak di bagian tengah, daerah perbukitan pada bagian timur dan barat, serta kawasan pesisir di sebelah selatan.

Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang luas dengan enam sungai besar yang membelah daratan, yaitu Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Oya, Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Bedog menjadikan Kabupaten Bantul memiliki banyak potensi pengembangan. Keanekaragaman hayati dan bentang alam menjadikan kabupaten tersebut dikenal dengan slogannya, yaitu "Projotamansari" yang merupakan sebuah akronim dari

Produktif-Profesional, Ijo Royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri.

Kapanewon Dlingo merupakan wilayah paling luas, yaitu seluas 55,87 km², dengan 6 kalurahan dan 58 dusun. Adapun wilayah paling sempit yakni di Kapanewon Srandakan dengan luas 18,32 km² yang terdiri dari atas 2 kalurahan dan 43 dusun. Kapanewon Imogiri menjadi wilayah dengan jumlah kalurahan dan pedukuhan terbanyak, yaitu 8 kalurahan dan 72 pedukuhan.

Tabel 6. Jumlah Kalurahan, Dusun, dan Luas Kapanewon di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Jumlah Kalurahan	Jumlah Dusun	Luas (km ²)	Prosentase (%)
1	Srandakan	2	43	18.32	3.6%
2	Sanden	4	62	23.16	4.6%
3	Kreték	5	52	26.77	5.3%
4	Pundong	3	49	24.3	4.8%
5	Bambanglipuro	3	45	22.7	4.5%
6	Pandak	4	49	24.3	4.8%
7	Pajangan	3	55	33.25	6.6%
8	Bantul	5	50	21.95	4.4%
9	Jetis	4	64	21.47	4.3%
10	Imogiri	8	72	54.49	10.8%
11	Dlingo	6	58	55.87	11.1%
12	Banguntapan	8	57	28.48	5.6%
13	Pleret	5	47	22.97	4.6%
14	Piyungan	3	60	32.54	6.5%
15	Sewon	4	63	27.16	5.4%
16	Kasih	4	53	32.38	6.4%
17	Sedayu	4	54	34.36	6.8%
JUMLAH		75	933	504.47	100.0%

Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka, 2020

Kelas ketinggian tempat didominasi pada rentang 25-100 mdpl (seluas 27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak di bagian utara, tengah, dan tenggara. Adapun wilayah dengan ketinggian di atas 100 mdpl terdapat pada sebagian Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Adapun wilayah dengan elevasi rendah (<7 mdpl) umumnya berbatasan dengan Samudera Hindia, seperti Kapanewon Kretek, Sanden, dan Srandakan seluas 3.228 Ha (6,37%) dari luas Kabupaten Bantul.

Kalurahan di Kabupaten Bantul dibagi berdasarkan statusnya, yaitu kalurahan perdesaan (*rural area*) dan perkotaan (*urban area*). Wilayah perkotaan di Kabupaten Bantul mencapai 41 kalurahan dengan 34 kalurahan lainnya termasuk dalam kawasan perdesaan.

Tabel 7. Status Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Kapanewon	Status Kalurahan	
		Perdesaan	Perkotaan
1	Srandakan	Poncosari	Trimurti
2	Sanden	Sri Gading	Gadingsari
			Gadingharjo
			Murtigading
3	Kretek	Tirtoharjo	Donotirto
		Parangtritis	
		Tirtosari	
		Tirtomulyo	
4	Pundong	Seloharjo	Srihardono
		Panjangrejo	
5	Bambanglipuro	Sumbermulyo	Sidomulyo
			Mulyodadi
6	Pandak	Caturharjo	Wijirejo
		Triharjo	
		Gilangharjo	

7	Bantul	Sabdodadi	Palbapang
			Ringinharjo
			Bantul
			Trirenggo
8	Imogiri	Selopamioro	Kebonagung
		Sriharjo	Karangtalun
		Karangtengah	Imogiri
			Wukirsari
			Girirejo
9	Dlingo	Mangunan	Dlingo
		Muntuk	
		Temuwuh	
		Jatimulyo	
		Terong	
10	Jetis	Patalan	Trimulyo
		Canden	Sumberagung
11	Pleret	Bawuran	Wonokromo
		Wonolelo	Pleret
		Sgoroyoso	
12	Piyungan	Sitimulyo	Srimulyo
			Srimartani
13	Banguntapan	Tamanan	Baturetno
		Jagalan	Banguntapan
		Singosaren	
		Wirokerten	
		Jambidan	
		Potorono	
14	Sewon	Pendowoharjo	Bangunharjo
		Timbulharjo	Panggunharjo

15	Kasihlan	Tamantirto	Tirtonirmolo
		Ngestiharjo	
		Bangunjiwo	
16	Pajangan	Guwosari	Triwidadi
			Sendangsari
17	Sedayu	Argodadi	Argosari
		Argomulyo	Argorejo

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda. Bantul

1. Natalitas

Secara umum, persebaran penduduk di Kabupaten Bantul tergolong tidak merata di mana pusat pertumbuhan wilayahnya berada pada perbatasan kabupaten dengan Kota Yogyakarta. Total penduduk mencapai 949.325 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,02 pada tahun 2018-2019 (BPS, 2020). Adapun wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kapanewon Pleret (4.874 jiwa/km²), Kapanewon Sewon (3.812 jiwa/km²), dan Kapanewon Piyungan (3.067 jiwa/km²). Adapun wilayah dengan kepadatan terendah berada pada Kapanewon Imogiri (726 jiwa/km²).

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul cenderung melambat seiring meningkatnya tingkat kesadaran untuk merencanakan kelahiran anak pascapernikahan. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Bantul berjumlah 1.013.170 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023). Angka kelahiran dari tahun 2019–2021 mengalami penurunan sebagai berikut: tahun 2019 sebanyak 16.470; tahun 2020 sebanyak 15.642; tahun 2021 sebanyak 15.189; dan tahun 2022 sebanyak 10.600 kelahiran (Sari, Rahmawati, Kuntoro, & Wedhaninggar, 2023). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020-2022 sebanyak 1,58%.

Sebagian besar rumah di Kabupaten Bantul dibangun secara swadaya atau mandiri oleh masyarakat. Adapun pembangunan

secara swadaya ini mendorong peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) akibat tidak lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perumahan sehingga tidak memenuhi standar. Keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Hal tersebut disebabkan karakteristik permukiman desa masih cenderung bersifat tradisional sehingga parameter RLTH di mana meliputi kondisi fisik bangunan rumah, keterjangkauan air bersih dan sanitasi, jaringan listrik dan komunikasi, serta kondisi jalan dan drainase, mendorong permukiman di perdesaan menjadi tergolong RTLH.

Sebagai contoh, Kepanewon Imogiri dengan RTLH terbanyak (1.484 unit) merupakan wilayah dataran tinggi yang mana sebagian besar wilayahnya berupa lahan hutan dan kebun. Kondisi sarana dan prasarananya masih belum memenuhi standar, seperti kondisi bangunan yang semi permanen ataupun penggunaan material kayu. Oleh karenanya, jika dilihat berdasarkan standar rumah layak huni (RLH), banyak rumah di Kepanewon Imogiri akan tergolong menjadi RTLH.



Gambar 20. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul

Tabel 8. Data Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk per Kapanewon Tahun 2022

No	Kapanewon	Penduduk	Laju pertumbuhan	Kepadatan penduduk
1	Srandakan	31.424	1,36	715,28
2	Sanden	31.596	1,09	364,25
3	Kreték	30.917	1,06	154,91
4	Pundong	36.146	1,67	526,44
5	Bambanglipuro	42.012	1,55	1.850,75
6	Pandak	52.904	1,43	2.177,12
7	Bantul	66.182	1,48	3.015,13
8	Jetis	60.559	1,84	2.474,83
9	Imogiri	64.683	1,73	1.187,06
10	Dlingo	40.030	1,56	716,48
11	Pleret	51.820	2,06	2.255,99
12	Piyungan	56.108	1,75	1.724,28
13	Banguntapan	127.029	1,05	4.460,29
14	Sewon	111.713	1,14	4.113,14
15	Kasihán	117.287	1,04	3.622,21
16	Pajangan	39.866	2,17	1.198,98
17	Sedayu	52.894	2,01	1.539,41
		1.013.170	1,45	1.998,95

Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka, 2023

Berbeda dengan persebaran RTLH, kondisi permukiman kumuh di Kabupaten Bantul disebabkan oleh peningkatan kebutuhan rumah khususnya di kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, serta keterbatasan dan tingginya harga lahan. Adapun sesuai dengan SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi

seluas 79,61 Ha. Kawasan kumuh di Kabupaten Bantul berpusat pada kawasan perkotaan dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.

Tiga kapanewon dengan penduduk besar yakni: Kapanewon Banguntapan sebanyak 114.007 jiwa, Kapanewon Kasihan sebanyak 105.208 jiwa; dan Kapanewon Sewon sebanyak 100.763 jiwa (Nugroho, 2022). Adapun tiga kalurahan dengan penduduk terbesar yakni: Kalurahan Banguntapan di Kapanewon Banguntapan sebanyak 38.476; Kalurahan Ngestiharjo di Kapanewon Kasihan sebanyak 30.012; dan Kalurahan Panggungharjo di Kapanewon Sewon sebanyak 28.486 jiwa, sedangkan tiga kalurahan paling sedikit penduduknya yakni Kalurahan Jagalan di Kapanewon Banguntapan sebanyak 2.951; Kalurahan Tirtohargo di Kapanewon Kretek sebanyak 3.016; dan Kalurahan Karangtalun di Kapanewon Imogiri sebanyak 3.150 jiwa (Nugroho, 2022).

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta akan cenderung lebih padat dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kapanewon di bagian selatan. Kapanewon Pleret dan Kasihan menjadi contoh nyata di mana wilayah peri urban menjadi menarik untuk ditinggali karena harga lahan yang masih relatif terjangkau dan jangkauan jarak yang tidak jauh dari pusat kegiatan dan perekonomian di Kota Yogyakarta.

Selain pertumbuhan penduduk yang terklasifikasi sedang, kondisi demografi masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pernikahan. Fenomena pernikahan akan memengaruhi penambahan jumlah penduduk dan mendorong kebutuhan untuk memiliki rumah atau tempat tinggal yang terpisah dengan orang tua. Tren data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kapanewon menunjukkan peningkatan jumlah pernikahan pada tahun 2019. Seluruhnya didominasi oleh kawasan perkotaan, yaitu Kapanewon Pleret, Piyungan, dan Sewon.

2. Mortalitas

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Angka kematian di Kabupaten Bantul dari tahun 2019-2022 sebagai berikut: tahun 2019 sebanyak 12.245; tahun 2020 sebanyak 10.011; tahun 2021 sebanyak 14.412; tahun 2022 sebanyak 13.784 (Sari, Rahmawati, Kuntoro, & Wedhaninggar, 2023). Adapun angka kematian Kabupaten Bantul antara tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut: tahun 2016 sebanyak 3.453; tahun 2017 sebanyak 3.825; dan tahun 2018 sebanyak 20.653 kematian (Rahmawati & Sari 2019).

3. Transisi demografi dalam pembangunan

Transisi demografi Kabupaten Bantul merujuk pada perubahan dalam struktur dan karakteristik populasi suatu wilayah seiring berjalannya waktu. Transisi demografi di Kabupaten Bantul terkait dengan perubahan dalam tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat pertumbuhan penduduk.

Pada skala provinsi, tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul selama tujuh tahun berturut-turut menduduki peringkat ke tiga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Bantul di mana sebagian besar didominasi oleh wilayah perdesaan dengan fokus pengembangan sektor pertanian tradisional. Adapun kenaikan garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan harga pasar sehingga apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan daya beli, maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Rusunawa pertama dibangun terdapat di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon pada tahun 2008. Rumah susun tersebut diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang belum memiliki tempat tinggal dengan harga sewa

pada awal operasional berkisar antara Rp125.000 – Rp200.000 per kamar per bulan. Adapun untuk rusunawa yang berada di Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan ditujukan untuk pekerja. Namun demikian, keberadaan rusunawa pekerja tersebut masih sepi peminat jika dibandingkan dengan ketiga rusun yang terlebih dahulu beroperasi.

D. Transisi Demografi Kabupaten Sleman

1. Natalitas

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman cenderung melambat seiring meningkatnya tingkat kesadaran untuk merencanakan kelahiran anak pascapernikahan. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Sleman berjumlah 1.013.170 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023). Angka kelahiran dari tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan sebagai berikut: tahun 2019 sebanyak 16.470; tahun 2020 sebanyak 15.642; tahun 2021 sebanyak 15.189; dan tahun 2022 sebanyak 10.600 kelahiran (Sari, Rahmawati, Kuntoro, & Wedhaninggar, 2023). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2020-2022 sebanyak 1,58%.



Gambar 21. Rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Sleman

Tiga kapanewon dengan penduduk besar yakni: Kapanewon Depok sebanyak 131.517 jiwa, Kapanewon Ngaglik sebanyak 106.764 jiwa; dan Kapanewon Gamping sebanyak 104.881 jiwa (Lestanti, *et al.*, 2022). Adapun tiga kapanewon dengan penduduk terkecil yakni: Kapanewon Cangkringan sebanyak 31.856 jiwa; Kapanewon Minggir sebanyak 32.820 jiwa; dan Kapanewon Moyudan sebanyak 34.181 jiwa. Jumlah pengangguran terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta di atas 15 tahun yang menganggur paling tinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 46 ribu orang (Muslim, *et al.*, 2023).

2. Mortalitas

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Angka kematian di Kabupaten Sleman dari tahun 2019-2022 sebagai berikut: tahun 2019 sebanyak 12.245; tahun 2020 sebanyak 10.011; tahun 2021 sebanyak 14.412; tahun 2022 sebanyak 13.784 (Sari, Rahmawati, Kuntoro, & Wedhaninggar, 2023). Adapun angka kematian Kabupaten Sleman antara tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut: tahun 2016 sebanyak 3.453; tahun 2017 sebanyak 3.825; dan tahun 2018 sebanyak 20.653 kematian (Rahmawati & Sari, 2019).

3. Transisi demografi dalam pembangunan

Transisi demografi Kabupaten Sleman merujuk pada perubahan dalam struktur dan karakteristik populasi suatu wilayah seiring berjalannya waktu. Transisi demografi di Kabupaten Sleman terkait dengan perubahan dalam tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat pertumbuhan penduduk.

Salah satu kabupaten di DIY yang diduga telah berada di tahap akhir transisi demografi adalah Kabupaten Sleman. Salah satu buktinya dapat dilihat dari struktur penduduknya di mana

kondisinya hampir sama dengan dengan DIY. Meskipun demikian, boleh jadi pula transisi demografi yang terjadi di Sleman sangat berbeda dengan kondisi di DIY.

Dalam rangka menjawab kondisi tersebut maka pembahasan mengenai transisi demografi di Kabupaten Sleman perlu untuk dibahas. Selain itu diharapkan dari hasil pembahasan akan menjadi masukan yang berguna bagi pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Feng (2011) bahwa informasi mengenai transisi demografi yang terjadi di suatu daerah akan menjadi input kebijakan yang sangat penting utamanya dalam aspek perencanaan pembangunan kependudukan. Apalagi saat ini Kabupaten Sleman melalui Bappeda telah mengadakan kajian strategis mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Kependudukan sehingga informasi mengenai pembahasan transisi demografi menjadi penting. Selain itu pembahasan mengenai transisi demografi ini juga akan membuka kesempatan untuk pembahasan baru dengan mengaitkannya dengan transisi epidemiologi, bonus demografi, pertumbuhan ekonomi, atau capaian pembangunan lain di Kabupaten Sleman.

E. Transisi Demografi Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak antara $7^{\circ} 38'42''$ – $7^{\circ} 59'3''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ} 1'37''$ – $110^{\circ} 16'26''$ Bujur Timur. Kabupaten Kulon Progo memiliki luasan wilayah sebesar 586,28 km² terdiri dari 12 kapanewon, 88 kalurahan, dan 918 dusun. Wilayah terluas adalah Kapanewon Kokap dengan luas 73,80 km² (12,59%) dan Kapanewon Samigaluh dengan luas 69,29 km² (11,82%). Wilayah terkecil adalah Kapanewon Wates dengan luas 32,00 km² (5,46%).

Backlog kepemilikan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 11.453, artinya sebanyak 11.453 rumah tangga tidak menempati

rumah milik pribadi. Sementara itu, jumlah *Backlog* hunian adalah 9.927, artinya sebanyak 9.927 rumah tangga tidak tinggal di rumah sendiri (Dinas PUP-ESDM DIY, 2018).

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 14.891 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 8 berikut.

Tabel 9. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

No	Kapanewon	Rumah Tidak Layak Huni			Total
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	
1	Galur	149	262	90	501
2	Girimulyo	346	597	525	1468
3	Kalibawang	369	384	231	984
4	Kokap	617	1.108	1.023	2.748
5	Lendah	318	455	389	1.162
6	Nanggulan	164	334	350	848
7	Panjatan	164	342	373	879
8	Pengasih	495	637	609	1.741
9	Samigaluh	258	549	706	1.513
10	Sentolo	673	650	600	1.923
11	Wates	118	278	260	656
12	Temon	124	223	121	468
Total					14.891

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2017

Permukiman kumuh di Kabupaten Kulon Progo terdapat di 5 kapanewon dengan total luas 293,79 Ha. Kawasan permukiman kumuh di Kulon Progo tertuang dalam Surat Keputusan Bupati

Kulon Progo Nomor 224/A Tahun 2016 tentang Lokasi Penanganan Kumuh.

1. Natalitas

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo cenderung melambat seiring meningkatnya tingkat kesadaran untuk merencanakan kelahiran anak pascapernikahan. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Kulon Progo berjumlah 451.342 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023). Angka kelahiran dari tahun 2019–2021 mengalami penurunan sebagai berikut: tahun 2019 sebanyak 4.903; tahun 2020 sebanyak 4.768; tahun 2021 sebanyak 4.535; dan tahun 2022 sebanyak 4.137 kelahiran (Setyawan, Kushadi, & Marwati, 2023). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2020–2022 sebanyak 1,94%.



Gambar 22. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo

Tiga kapanewon dengan penduduk besar yakni: Kapanewon Pengasih sebanyak 54.681 jiwa, Kapanewon Wates sebanyak 50.279 jiwa; dan Kapanewon Sentolo sebanyak 51.669 jiwa (Setyawan, Kushadi, & Marwati, 2023). Kapanewon dengan

penduduk paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo yakni, Kapanewon Girimulyo sebanyak 24.817 (5,5%) dengan kepadatan penduduk sebesar 452 jiwa per km². *Sex ratio* di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 sebesar 98.

2. Mortalitas

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Adapun angka kematian Kabupaten Kulon Progo antara tahun 2018–2022 adalah sebagai berikut: 2018 sebesar 2.270; tahun 2019 sebesar 2.293; tahun 2020 sebesar 2.316; tahun 2021 sebesar 2.340; dan tahun 2022 sebesar 2.364 jiwa (BPS Kulon Progo).

3. Transisi demografi dalam pembangunan

Transisi demografi Kabupaten Kulon Progo merujuk pada perubahan dalam struktur dan karakteristik populasi suatu wilayah seiring berjalannya waktu. Transisi demografi di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan perubahan dalam tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat pertumbuhan penduduk.

Salah satu kabupaten di DIY yang diduga telah berada di tahap akhir transisi demografi adalah Kabupaten Kulon Progo. Salah satu buktinya dapat dilihat dari struktur penduduknya di mana kondisinya hampir sama dengan dengan DIY. Meskipun demikian, boleh jadi pula transisi demografi yang terjadi di Kulon Progo sangat berbeda dengan kondisi di DIY.

Dalam rangka menjawab kondisi tersebut maka pembahasan mengenai transisi demografi di Kabupaten Kulon Progo perlu untuk dibahas. Selain itu diharapkan dari hasil pembahasan

akan menjadi masukan yang berguna bagi pembangunan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Feng (2011) bahwa informasi mengenai transisi demografi yang terjadi di suatu daerah akan menjadi input kebijakan yang sangat penting utamanya dalam aspek perencanaan pembangunan kependudukan. Apalagi saat ini Kabupaten Kulon Progo melalui Bappeda telah mengadakan kajian strategis mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Kependudukan sehingga informasi mengenai pembahasan transisi demografi menjadi penting. Selain itu pembahasan mengenai transisi demografi ini juga akan membuka kesempatan untuk pembahasan baru dengan mengaitkannya dengan transisi epidemiologi, bonus demografi, pertumbuhan ekonomi atau capaian pembangunan lain di Kabupaten Kulon Progo.

F. Transisi demografi Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara astronomis Kabupaten Gunungkidul terletak antara $7^{\circ}46'$ – $8^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}21'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur.

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah sebesar $1.485,36 \text{ km}^2$ atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kapanewon dan 144 Kaluharan. Adapun Kapanewon Semanu merupakan kapanewon dengan luas wilayah terbesar yaitu dengan luas sebesar $108,39 \text{ km}^2$, sedangkan Kapanewon Ngawen merupakan kapanewon terkecil dengan luas sebesar $46,59 \text{ km}^2$.

Tabel 10. Ibu Kota Kapanewon, Luas dan Ketinggian di Kabupaten Gunungkidul

No	Kapanewon	Ibukota Kapanewon	Luas (km ²)	Persentase Luas Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1.	Panggung	Giriharjo	99,80	6,72%	330
2.	Purwosari	Giritirto	71,76	4,83%	342
3.	Paliyan	Karangduwet	58,07	3,91%	180
4.	Saptosari	Kepek	87,83	5,91%	341
5.	Tepus	Sidoharjo	104,91	7,06%	274
6.	Tanjungsari	Kemiri	71,63	4,82%	293
7.	Rongkop	Semugih	83,46	5,62%	377
8.	Girisubo	Jerukwudel	94,57	6,37%	215
9.	Semanu	Semanu	108,39	7,30%	190
10.	Ponjong	Ponjong	104,49	7,03%	258
11.	Karangmojo	Gedangrejo	80,12	5,39%	226
12.	Wonosari	Kepek	75,51	5,08%	206
13.	Playen	Ngawu	105,26	7,09%	215
14.	Patuk	Patuk	72,04	4,85%	236
15.	Gedangsari	Hargomulyo	68,14	4,59%	229
16.	Nglipar	Nglipar	73,87	4,97%	236
17.	Ngawen	Kampung	46,59	3,14%	218
18.	Semin	Semin	78,92	5,31%	206
Gunungkidul		Wonosari	1.485,36	100%	

Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi laju pertumbuhan serta kepadatan penduduk tiap kapanewon dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan penduduk

No	Kapanewon	Penduduk	Laju pertumbuhan	Kepadatan penduduk
1	Panggung	29,79	1,55	298,55
2	Purwosari	21,16	1,32	294,89
3	Paliyan	33	1,63	568,3
4	Saptosari	39,62	1,78	451,11
5	Tepus	36,36	1,67	346,62
6	Tanjungsari	29,02	1,59	405,17
7	Rongkop	29,29	1,29	350,98
8	Girisubo	25,25	1,65	267,05
9	Semanu	60,18	1,83	555,26
10	Ponjong	56,09	1,57	536,84
11	Karangmojo	57,47	1,94	717,35
12	Wonosari	90,29	1,71	1.195,82
13	Playen	62,61	1,73	594,83
14	Patuk	35,35	1,85	490,82
15	Gedangsari	39,48	1,52	579,44
16	Nglipar	33,78	1,65	457,38
17	Ngawen	34,77	1,37	746,36
18	Semin	57,3	1,87	726,15
Jumlah		770,88	1,68	518,99

Sumber: Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023

Terdapat 15 kalurahan yang memiliki status sebagai kalurahan budaya dan 22 desa sebagai rintisan desa budaya. Desa budaya merupakan tempat aktivitas budaya di desa yang di dalamnya

terdapat berbagai aktivitas adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. Berikut merupakan data desa budaya yang dimaksud. Salah satu desa budaya yang mempunyai ciri khusus dan khas di Gunungkidul adalah Kampung Pitu di Patuk Gunungkidul.



Gambar 23. Kampung Pitu Patuk Gunungkidul

Di Kampung Pitu ini hanya terdapat tujuh rumah dan dihuni oleh 7 KK (kepala keluarga), tidak pernah lebih maupun kurang. Ketika ada anggota keluarga yang menikah maka mereka harus keluar dari kampung Pitu, masyarakat setempat tidak berani melanggar *paugeran* turun termurun ini hingga sekarang.

1. Natalitas

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunungkidul cenderung melambat seiring meningkatnya tingkat kesadaran untuk merencanakan kelahiran anak pascapernikahan. Pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Gunungkidul berjumlah 770.883 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,8. Angka kelahiran tahun 2022 sebanyak 8.696 kelahiran (Sari, Rahmawati, Kuntoro, & Wedhaninggar, 2023). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2020 sebanyak 0,98%.

Penduduk di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun) yaitu sebesar 66,38%. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, Kabupaten

Gunungkidul memiliki piramida penduduk ekspansif yang berarti sebagian besar penduduknya adalah usia muda. Oleh karena itu, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah angkatan kerja yang ada.

Pada tahun 2017–2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi tetapi lebih cenderung menurun. Pada tahun 2021 jumlahnya adalah 135.740 jiwa. Sementara itu, garis kemiskinan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 angkanya mencapai Rp 277.761/kapita/bulan.

Status penguasaan bangunan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk bagian perumahan. Semakin banyak penduduk yang mempunyai rumah sendiri maka semakin banyak juga masyarakat yang tergolong mapan dan sejahtera terutama memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2019–2021 persentase tertinggi status penguasaan bangunan di Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini adalah milik sendiri tahun 2021, persentasenya adalah 95,58%. Secara lebih detail, persentase status penguasaan bangunan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 12. Persentase Penguasaan Bangunan

Status Penguasaan Bangunan	Persentase (%)		
	2019	2020	2021
Milik Sendiri	94,35	94,58	95,58
Kontrak/Sewa	1,15	1,02	0,32
Bebas Sewa	3,89	4,22	4,10
Dinas	0,61	0,18	0,00
Lainnya			0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi D.I Yogyakarta, 2019-2021

Berdasarkan RPJM Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2020 terdapat 17.695 rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunungkidul.

Adapun secara keseluruhan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami penurunan selama periode 2016 hingga 2020. Berbanding terbalik dengan jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Gunungkidul juga terus mengalami kenaikan selama periode tersebut di mana pada tahun 2020 jumlahnya adalah 153.904 unit. Secara lebih rinci, pada tabel 12 berikut menyajikan jumlah rumah tidak layak huni dan layak huni di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 13. Jumlah rumah tidak layak huni dan layak huni Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tidak layak huni	25.840	24.928	22.994	19.830	17.696
Jumlah rumah layak huni	n/a	146.468	148.485	151.658	153.904

Sumber: RPJM Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

Area permukiman kumuh yang masih ditemui di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 seluas 160,40 ha dan tersebar pada 13 lokasi. Angka ini turun sebesar 2,69% dari tahun 2019. Adanya penurunan luas areal permukiman kumuh tersebut disebabkan adanya program penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan pada tahun 2019, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Lokasi permukiman kumuh tersebut berada pada empat Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kapanewon Wonosari (Kalurahan Kepek, Kalurahan Baleharjo, dan Kalurahan Selang), sedangkan 1 Kalurahan berada di Kapanewon Playen yaitu Kalurahan Logandeng. Penetapan lokasi ini berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor

350/KPTS/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



Gambar 24. Rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunungkidul

Tiga kapanewon dengan penduduk besar yakni: Kapanewon Wonosari sebanyak 90,29 ribu jiwa, Kapanewon Playen sebanyak 62,61 ribu jiwa; dan Kapanewon Semanu sebanyak 60,18 ribu jiwa (Kurniawan, Umam, Firdausya, Tyas, & Qarina, 2023).

2. Mortalitas

Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Angka kematian di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2019–2022 sebagai berikut: tahun 2019 sebanyak 12.245; tahun 2020 sebanyak 10.011; tahun 2021 sebanyak 14.412; tahun 2022 sebanyak 13.784 (Sari, Rahmawati, Kuntoro, & Wedhaninggar, 2023). Adapun angka kematian Kabupaten Gunungkidul antara tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut: tahun 2016 sebanyak 3.453; tahun 2017 sebanyak 3.825; dan tahun 2018 sebanyak 20.653 kematian (Rahmawati & Sari 2019).

3. Transisi demografi dalam pembangunan

Transisi demografi Kabupaten Gunungkidul merujuk pada perubahan dalam struktur dan karakteristik populasi suatu wilayah seiring berjalannya waktu. Transisi demografi di Kabupaten Gunungkidul terkait dengan perubahan dalam tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat pertumbuhan penduduk.

Salah satu kabupaten di DIY yang diduga telah berada di tahap akhir transisi demografi adalah Kabupaten Gunungkidul. Salah satu buktinya dapat dilihat dari struktur penduduknya di mana kondisinya hampir sama dengan dengan DIY. Meskipun demikian, boleh jadi pula transisi demografi yang terjadi di Gunungkidul sangat berbeda dengan kondisi di DIY.

Dalam rangka menjawab kondisi tersebut maka pembahasan mengenai transisi demografi di Kabupaten Gunungkidul perlu untuk dibahas. Selain itu diharapkan dari hasil pembahasan akan menjadi masukan yang berguna bagi pembangunan kependudukan di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Feng (2011) bahwa informasi mengenai transisi demografi yang terjadi di suatu daerah akan menjadi input kebijakan yang sangat penting utamanya dalam aspek perencanaan pembangunan kependudukan. Apalagi saat ini Kabupaten Gunungkidul melalui Bappeda telah mengadakan kajian strategis mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Kependudukan sehingga informasi mengenai pembahasan transisi demografi menjadi penting. Selain itu, pembahasan mengenai transisi demografi ini juga akan membuka kesempatan untuk pembahasan baru dengan mengaitkannya dengan transisi epidemiologi, bonus demografi, pertumbuhan ekonomi atau capaian pembangunan lain di Kabupaten Gunungkidul.

BAB
III

MEMBANGUN MANUSIA DI YOGYAKARTA

Penduduk dan pembangunan, dua kata yang mempunyai makna berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Penduduk mengacu pada manusia, individu, orang atau sekumpulan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu. Adapun pembangunan mempunyai arti proses mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau membuat sesuatu lebih baik, untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh penduduk. Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menyejahterakan penduduk baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (*empowered*) dan makin meluasnya berbagai kesempatan (*opportunity*) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah, struktur, dan laju pertumbuhan penduduk, serta persebarannya untuk

mencapai pemerataan dan keadilan.

Sementara di sisi yang lain, penduduk juga menjadi penentu dan pelaku dalam kesuksesan pembangunan. Penduduk sebagai penentu dan pelaku utama dalam pembangunan memerlukan kualitas dan produktivitas yang tinggi sehingga pembangunan yang dihasilkan juga akan tinggi. Kualitas dan produktivitas dapat dibangun dan ditingkatkan apabila jumlah dan laju pertumbuhan bisa dikendalikan sehingga seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, selain itu persebarannya juga perlu diarahkan untuk mencapai keseimbangan tersebut.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas penduduk. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka tercapainya penduduk tumbuh seimbang harus ditingkatkan sebagai langkah penting dalam rangka pembangunan kependudukan terutama meningkatkan kualitas penduduk dan melakukan pengarahannya penduduk. Pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk harus didorong melalui pemberdayaan dan pembangunan keluarga sebagai unit terkecil sasaran pembangunan nasional.

Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat disebabkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan menghasilkan kehamilan serta kelahiran tidak dapat dihentikan. Sementara di saat bersamaan, jumlah penduduk yang meningkat juga memerlukan pasokan pangan yang cukup. Jika tidak ada faktor penghambat, penduduk akan tumbuh menurut deret ukur, sedangkan sumber-sumber pangan akan tumbuh seperti deret hitung (Suwito, 2020). Faktor yang menghambat perkembangan penduduk adalah *preventive checks* yaitu *moral restraint* dan *vice* serta *positive check* yaitu *vice* dan *misery*. Dalam *preventive checks* pengurangan penduduk dilakukan dengan

menurunkan kelahiran (Sumini, 2021) melalui upaya-upaya untuk mengekang nafsu seksual (*moral restraint*) dan pengurangan kelahiran melalui aborsi, homoseksualitas, *promiscuity* dan *adultery (vice)*. Adapun *positive checks* merupakan pengurangan penduduk melalui kematian yang meliputi kejahatan kriminalitas dan pembunuhan (*vice*) serta melalui berbagai penyebab kematian seperti epidemik, bencana alam, kelaparan dan peperangan (*misery*).

Konsep pembangunan memiliki makna yang sangat luas dan senantiasa berkembang. Pandangan tradisional memaknai pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Alat ukur yang sering digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional/regional bruto (*gross national product* disingkat GNP) dan pertumbuhan pendapatan nasional/regional per kapita (*income per capita*). Sampai dengan era 1970-an, konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai sebuah fenomena ekonomi dan ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya level pendapatan per kapita dan pertumbuhannya. Wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan yang tinggi dianggap berhasil dalam mengelola proses pembangunan. Sebaliknya, jika level pendapatan per kapita dan pertumbuhannya rendah maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang kurang berkembang atau bahkan terbelakang.

Pertumbuhan yang tinggi juga diyakini akan membawa manfaat bagi terciptanya kesempatan kerja di banyak sektor dan mampu mendorong kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih merata. Mekanisme ini dikenal luas dengan istilah “efek penetesan ke bawah” atau *trickle down effect*. Pada masa itu, banyak negara yang mengambil kebijakan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara

persoalan bagaimana mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan sering kali menjadi prioritas berikutnya.

A. Dinamika Pertumbuhan penduduk Yogyakarta

Setiap manusia hidup tidak dapat dilepas dari ruang/wilayah untuk berdomisili atau bertempat tinggal. Setiap wilayah tentu memiliki permasalahan. Meskipun setiap permasalahan pada suatu wilayah sering muncul, manusia akan selalu mencari solusi terbaiknya karena manusia adalah makhluk hidup yang berakal.

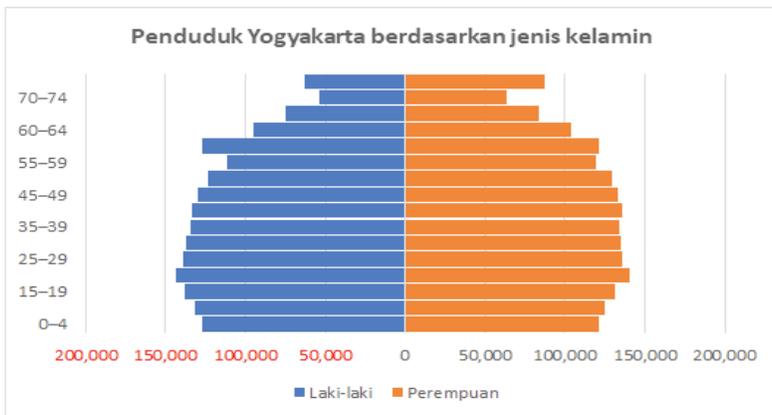
Pembangunan memerlukan informasi tentang subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Objek pembangunan dapat manusia, makhluk hidup, atau segala barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Oleh karena manusia selain sebagai subjek juga menjadi objek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu sudah semestinya diperlukan informasi yang banyak, akurat, dan tepat waktu tentang keadaan manusia itu sendiri.

1. Struktur penduduk Yogyakarta

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk di mana penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia muda. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk D.I. Yogyakarta tahun 2020 tercatat 3.668.719 jiwa (SP 2020). Adapun jumlah penduduk D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 3.761.870 jiwa (Muslim, Widodo, Widyastuti, & Nuraeni, 2023).

Tabel 14. Jumlah penduduk Yogyakarta berdasarkan kabupaten/ kota

Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk	
	2020	2022
Kulon Progo	436.395	451.342
Bantul	985.770	1.013.170
Gunungkidul	747.161	770.883
Sleman	1.125.804	1.147.562
Yogyakarta	373.589	378.913
D.I Yogyakarta	3.668.719	3.761.870



Gambar 25. Komposisi penduduk Yogyakarta tahun 2022

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 49% laki-laki dan 51% perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, di mana pada tahun 2020 sebesar 98,22 (SP 2020), sedangkan pada tahun 2022 sebesar 98,02. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-

laki untuk 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 berjumlah sekitar 3.761.870 jiwa. Kepadatan penduduk per km² D.I. Yogyakarta sebesar 1.186 jiwa/km². Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

2. Kuantitas dan kualitas penduduk Yogyakarta

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Priyono, 2008). SDM dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas mencerminkan salah satu unsur dari pengertian sumber daya manusia, yaitu daya fisik, sementara kualitas menggambarkan keterpaduan antara unsur daya fisik dan daya pikir.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi isu penting dalam pembangunan, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh negara di dunia. Kualitas menjadi indikator yang krusial karena berdasarkan *indicator global human capital index* (HCI) yang disusun oleh World Bank, peringkat Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, maupun Singapura. HCI Indonesia tahun 2020 baru berada di angka 0,54, sementara negara-negara tetangga Indonesia tersebut sudah berada di atas 0,60 (World Bank, 2021). Indikator global lain, *human development index* (HDI), peringkat Indonesia ada di 107 yang memosisikan Indonesia berada di bawah rata-rata dunia (UNDP, 2021).

Untuk mengejar ketertinggalannya, maka akselerasi pembangunan di segala bidang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, agenda pembangunan yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing” merupakan kebijakan yang tepat

dan harus didukung. Peningkatan kualitas dan daya saing harus menyertai meningkatnya kuantitas SDM dari waktu ke waktu.

Sebagai salah satu wujudnya, misalnya dalam bidang ketenagakerjaan, SDM yang diharapkan adalah pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, dan menguasai IPTEK yang terus berkembang. Kondisi ini akan mendukung terciptanya produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Pembangunan akan optimal apabila pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja juga menjadi bagian dari agenda pembangunan global seperti yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Salah satu tujuan SDGs yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan SDGs ini menyiratkan makna bahwa produktivitas yang ingin dicapai adalah pertumbuhan *output* dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja yang berkualitas. Tercantumnya isu produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda pembangunan global dan nasional mencerminkan pentingnya mencermati kualitas SDM yang bersumber dari data karakteristik kependudukan yang pengukurannya tercermin dari kuantitas karakteristik dan indikatornya.

Kuantitas dan kualitas SDM juga diperlukan di tataran regional, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, dapat diketahui potensi antarwilayah, baik potensi secara umum maupun spesifik masing-masing wilayah. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut dapat menjadi bahan acuan pemerintah daerah/provinsi dan kabupaten untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait kependudukan dan ketenagakerjaan. Data dan indikator yang menggambarkan

kuantitas dan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan di antaranya komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, klasifikasi generasi, pendidikan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, jumlah jam kerja dalam seminggu, kemampuan baca tulis, dan lain-lain.

B. Dinamika Pembangunan Manusia Tahun 2000–2022

Pembangunan manusia bukanlah pembangunan yang berdimensi tunggal, karena pada hakikatnya manusia adalah entitas yang sangat kompleks. *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan konsep pembangunan manusia (*human development*) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mengkaji manusia dari dua sisi yang berbeda seperti halnya dua sisi mata uang, tetapi keduanya harus berjalan secara berimbang. Sisi yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan berfungsi manusia melalui jalur perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan keterampilan. Adapun sisi yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya produktif.

1. Konsep pembangunan manusia dan ruang lingkup

Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada aspek pertumbuhan (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). UNDP (1995) mengajukan beberapa hal penting terkait dengan pembangunan manusia. **Pertama**, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai fokus

atau titik pusat perhatian. Dalam pengertian ini, unsur manusia ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek utama dalam proses pembangunan. Sebagai subjek, manusia adalah pelaku utama yang menentukan arah dan keberlangsungan proses pembangunan. Sementara itu sebagai objek, manusia adalah pihak yang akan paling banyak merasakan dan menikmati hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan.

Kedua, pembangunan bertujuan untuk memperbesar dan memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dan tidak sekadar untuk meningkatkan level pendapatannya. Hal ini menuntut sebuah konsep pembangunan manusia yang terpusat pada aspek penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja. **Ketiga**, pembangunan manusia tidak hanya fokus pada upaya peningkatan kemampuan atau kapabilitas manusia, tetapi juga fokus pada upaya-upaya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki manusia secara optimal. **Keempat**, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. **Kelima**, pembangunan manusia harus didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pilar produktivitas mengandung makna bahwa setiap penduduk harus diberi kesempatan atau akses yang seluas-luasnya untuk meningkatkan produktivitas maupun berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan. Pilar pemerataan mengandung makna bahwa semua penduduk memiliki kesempatan atau peluang yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini membawa konsekuensi semua hambatan untuk memperoleh akses harus dihapuskan dan diminimalisir. Pilar kesinambungan bermakna semua aktivitas

terhadap sumber daya ekonomi dan sosial tidak hanya untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan generasi pada masa yang akan datang. Sementara itu, pilar pemberdayaan memiliki makna semua penduduk harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses yang menentukan bentuk dan arah kehidupan mereka serta berpartisipasi penuh dalam mengambil manfaat yang dihasilkan oleh proses pembangunan.

Dinamika pembangunan manusia merujuk pada proses perubahan dan perkembangan yang dialami oleh individu dan masyarakat dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Ini melibatkan bagaimana individu tumbuh, belajar, beradaptasi, dan mengubah diri mereka sepanjang siklus hidup mereka.

Tabel 15. Jumlah Penduduk dan Indikator Pembangunan di Pulau Jawa

Propinsi	Penduduk	Ke- padat- an	Sex ratio	Keter- gantun- an	Peng- anggur	PDRB	Pe- ring- kat
DKI Jakarta	10.562.088	15.907	102,1	39,73	10,95	260.44	1
Jawa Barat	48.274.162	1.365	103,1	42,94	10,46	41.814	10
Jawa Tengah	36.516.035	1.113	101,1	43,16	6,48	38.598	13
D.I. Yogya- karta	3.668.719	1.171	98,2	45,40	4,57	35.646	2
Jawa Timur	40.665.696	851	99,6	42,33	5,84	57.651	14
Banten	11.904.562	1.232	104,0	42,89	10,64	47.6	8

Banyak faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan di suatu wilayah. Terkait dengan faktor dari manusia dalam hal

sebagai pelaku pembangunan, jumlah penduduk yang besar tidak selalu selaras dengan kualitas yang tinggi. Demikian pula sebaliknya, jumlah penduduk yang lebih sedikit tidak selalu selaras dengan kualitas yang lebih rendah.

Melakukan evaluasi pencapaian indikator pembangunan selain menggunakan indikator target dapat juga melakukan perbandingan dengan wilayah lain yang dikelompokkan berdasarkan letak geografis terdekat, atau level kondisi sosial dan ekonominya. Terkait capaian indikator pembangunan ekonomi dan kependudukan posisi D.I. Yogyakarta dapat dilihat dan dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Proses pembangunan seharusnya mencakup seluruh aspek, termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia penting dilakukan demi mencapai kemakmuran penduduk suatu wilayah/negara. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI) adalah pengukuran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *human development report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk/masyarakat) dan juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Oleh karena itu IPM menjadi data strategis sehingga masuk dalam indikator target pembangunan manusia Indonesia.

Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) telah menetapkan menjadi salah satu indikator target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perencanaan pembangunan tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), IPM juga menjadi salah satu indikator kinerja

utama (IKU) yang dipantau dan dievaluasi setiap triwulan. IPM D.I. Yogyakarta di level nasional hingga tahun 2020 menempati peringkat tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Angka IPM D.I. Yogyakarta tahun 2020 sebesar 79,97 dan masuk dalam kategori tinggi. Hanya DKI Jakarta yang sudah mencapai kategori sangat tinggi (81,11). Keunggulan indikator-indikator IPM D.I. Yogyakarta adalah dimensi umur panjang yang sehat, usia harapan hidup (UHH), dan harapan lama sekolah (HLS) yang merupakan tertinggi di Indonesia. Angkanya masing-masing 74,99 tahun dan 15,59 tahun.

Pembangunan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan fisik, pengalaman, budaya, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam dinamika pembangunan manusia:

a. Perkembangan fisik

Ini mencakup perubahan fisik yang terjadi pada tubuh manusia seiring waktu, mulai dari masa bayi hingga dewasa. Ini meliputi pertumbuhan tubuh, perubahan pada sistem saraf dan organ internal, serta perkembangan kemampuan motorik.

b. Perkembangan kognitif

Perkembangan kognitif ini melibatkan perubahan dalam cara individu berpikir, belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitarnya. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor seperti warisan genetik, pengalaman belajar, dan interaksi sosial.

c. Perkembangan sosial dan emosional

Perkembangan ini melibatkan pembentukan identitas sosial, hubungan interpersonal, dan keterampilan sosial. Selama proses ini, individu belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, memahami emosi orang lain, dan membentuk hubungan yang sehat dengan orang

lain.

d. Pembelajaran dan pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan manusia. Selama masa anak-anak dan remaja, individu belajar melalui pendidikan formal di sekolah, serta melalui pengalaman dan interaksi di lingkungan sekitar mereka. Pendidikan membantu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu.

e. Perkembangan moral

Perkembangan ini melibatkan perkembangan sistem nilai dan moral individu. Individu belajar membedakan antara benar dan salah, mengembangkan etika dan moralitas, serta memahami konsep tanggung jawab sosial.

Dinamika pembangunan manusia adalah proses yang berkelanjutan sepanjang siklus hidup. Setiap individu mengalami tahapan dan perubahan yang unik dalam perjalanan mereka, dengan faktor-faktor yang berbeda memengaruhi perkembangan mereka. Penting untuk dipahami bahwa perkembangan manusia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait.

2. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu negara. IPM dikembangkan oleh program pembangunan *United Nations Development Program* (UNDP) suatu badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 sebagai alternatif untuk mengukur kemajuan suatu negara bukan hanya berdasarkan parameter ekonomi seperti produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kesejahteraan manusia.

Tinggi atau rendahnya nilai IPM di suatu wilayah sangat

ditentukan oleh banyak faktor seperti karakteristik sosial budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi geografis dan kualitas infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan program pembangunan sosial ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada berbagai tingkatan. Perlu disadari bahwa perubahan atau peningkatan IPM ke arah yang lebih baik bukanlah sebuah proses yang instan yang dapat diukur perubahan dan dinikmati hasilnya dalam jangka waktu yang singkat. Perlu waktu yang cukup panjang untuk melihat seberapa besar perubahan capaian indikator yang dihasilkan oleh proses pembangunan manusia sehingga menuntut penyajian indikator dalam bentuk data series yang cukup panjang.

Pada periode 2010–2022, IPM D.I. Yogyakarta bertambah 5,37 poin, dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 80,64 pada tahun 2022 (rata-rata tumbuh 0,57%/tahun). IPM Indonesia (secara nasional) tumbuh lebih cepat pada periode yang sama. IPM Indonesia bertambah 6,38 poin, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 pada tahun 2022 (rata-rata tumbuh 0,77%). Perbedaan nilai (gap) IPM antara DIY dan Nasional cenderung semakin mengecil. Tahun 2010 gap antara DIY dan Nasional sebesar 8,84 poin, sedangkan tahun 2022 turun menjadi 7,73 poin.

Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2021). Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan

IPM terdiri dari tiga dimensi utama yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Setiap dimensi diukur meng-

gunakan indikator-indikator yang relevan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing dimensi:

a. Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan harapan hidup yang menggambarkan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang akan hidup. Selain itu, angka kematian bayi juga menjadi indikator penting dalam dimensi kesehatan.

Kesehatan menjadi unsur terpenting dari modal manusia di samping pendidikan. Dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh umur yang panjang dan sehat menjadi fokus utama dalam pembangunan manusia karena umur yang panjang dan sehat sangat menentukan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara. Artinya, dimensi kesehatan juga memiliki peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, umur harapan hidup penduduk pada saat lahir dinilai mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum sehingga dipilih menjadi indikator kesehatan. Semakin tinggi umur harapan hidup di suatu daerah menggambarkan derajat kesehatan penduduk yang semakin meningkat. Derajat kesehatan yang semakin meningkat akan mendorong peningkatan produktivitas kerja sehingga tingkat pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Umur harapan hidup penduduk pada saat lahir biasa dilambangkan dengan e_0 . Angka ini menyatakan perkiraan rata-rata usia atau tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu tertentu

(kohor yang sama) hingga akhir masa hidupnya, dengan asumsi pola mortalitasnya bersifat tetap. Penghitungan eo dilakukan menggunakan pendekatan life table. Namun, metode ini belum dapat diimplementasikan di Indonesia. Sistem registrasi penduduk belum terkelola dengan baik dan berkelanjutan sehingga data pokok kependudukan untuk penghitungan indikator yang berupa data kematian penduduk menurut kelompok umur juga belum tersedia secara lengkap dan berkala.

Nilai indeks kesehatan berada di antara angka nol (0) dan satu (1). Semakin mendekati nol menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dan semakin mendekati satu menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Untuk mempermudah penafsiran, nilai Indeks tersebut dapat dinyatakan dalam satuan ratusan atau dikalikan 100. Nilai indeks ini tidak akan memiliki makna khusus ketika berdiri sendiri. Akan tetapi, ketika dibandingkan dengan angka yang sama dari daerah lainnya atau angka yang sama pada waktu yang berbeda, dapat dilihat gambaran perbandingan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan antarwilayah dan perkembangan capaian antarwaktu.

b. Pendidikan

Dimensi pendidikan diukur dengan menggunakan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase populasi yang dapat membaca dan menulis, sedangkan angka partisipasi sekolah mencerminkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal. Pengetahuan menjadi salah satu unsur terpenting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global.

Tenaga kerja yang terdidik dan terampil sebagai *output* dari proses pendidikan formal dan non formal adalah komponen yang memengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa. Secara tidak langsung, hal ini juga akan memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Banyak fakta yang menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan. Tidak salah jika unsur pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

1) Rata-rata lama sekolah (RLS)

Konsep lama tahun bersekolah atau *years of schooling* didefinisikan sebagai lamanya seseorang mengikuti pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Indikator yang dapat dihitung berdasarkan lama bersekolah setiap individu penduduk adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) atau sering disingkat RLS. Sebagai indikator tunggal, RLS mampu menjadi ukuran akumulasi modal manusia suatu wilayah.

2) Harapan lama sekolah (HLS)

Indikator HLS mulai digunakan dalam penghitungan IPM tahun 2010 untuk menggantikan indikator angka melek huruf (AMH) yang dianggap sudah tidak mampu lagi menjelaskan perbedaan capaian kualitas pendidikan antarwilayah karena beberapa daerah sudah memiliki level mendekati 100%. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam satuan tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu pada masa mendatang. HLS dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah terkait usia awal dalam program wajib belajar.

Dari sekian banyak indikator pendidikan yang tersedia, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dianggap cukup representatif untuk menggambarkan capaian pembangunan pendidikan oleh penduduk di suatu wilayah. Artinya, kedua indikator tersebut mampu menggambarkan stok pencapaian pengetahuan yang menjadi unsur modal manusia di suatu wilayah.

c. Standar hidup

Dimensi standar hidup diukur dengan menggunakan indeks penghasilan riil per kapita. Indeks ini mencerminkan tingkat pendapatan per individu dalam suatu negara. Dimensi ketiga dari ukuran IPM merepresentasikan aspek ekonomi yakni standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.

Basis data yang digunakan BPS bersumber dari data pengeluaran per kapita penduduk hasil Susenas, sedangkan penyesuaian daya beli dan nilai riilnya dilakukan menggunakan metode Rao. Jumlah komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli sebanyak 96 komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan. Jumlah komoditas ini bertambah cukup signifikan dibandingkan dengan metode sebelumnya (27 komoditas).

Setelah mengukur masing-masing dimensi, nilai-nilai yang diperoleh dinormalisasi dan digabungkan menjadi satu indeks,

yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Skala indeks berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai 1 menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang tinggi.

IPM digunakan sebagai alat untuk membandingkan dan mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan tingkat pembangunan manusia mereka. Ini membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antara negara-negara, serta membantu merancang kebijakan pembangunan yang lebih berfokus pada aspek-aspek kesejahteraan manusia.

Secara umum, IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup panjang dan sehat diukur dengan indikator umur harapan hidup penduduk pada saat lahir (*life expectancy at age 0* atau *e0*). Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (*mean years of schooling*). Dimensi standar kehidupan yang layak diukur menggunakan indikator pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity/ PPP*) di wilayah yang bersangkutan.

3. Capaian indeks pembangunan manusia di Yogyakarta

Indikator IPM yang merepresentasikan capaian kualitas pembangunan manusia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mulai dihitung dan dipublikasikan sejak tahun 1996. Level angka IPM yang disajikan menggambarkan perbandingan posisi capaian pembangunan manusia. Sementara itu, perubahan atau pertumbuhannya merepresentasikan tingkat kemajuan capaian pembangunan manusia antarwaktu di berbagai wilayah di Indonesia. Namun demikian, pada masa tersebut indikator ini belum mampu disajikan secara periodik setiap tahun. Angka IPM kembali dihitung dan dipublikasikan pada tahun 1999 dan 2002 untuk melihat seberapa besar pengaruh atau dampak krisis

ekonomi terhadap capaian kualitas pembangunan manusia pada level regional provinsi dan kabupaten/kota. Mulai tahun 2004 sampai 2022, penghitungan dan penyajian angka IPM sudah mampu dilakukan secara berkala setiap tahun.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:

- a. IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai $IPM < 60$
- b. IPM kelompok “sedang” dengan kriteria $60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$
- c. IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria $70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$
- d. IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria $\text{Nilai IPM} \geq 80$

Selama periode 1996 – 2022, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan terkait dengan metode penghitungan maupun indikator penyusun IPM mengacu pada UNDP. Pada tahun 1996, nilai capaian IPM DIY berada pada level 71,8. Angka ini menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan kriteria UNDP, Angka IPM tahun 1996 tersebut termasuk dalam kategori menengah atas.

Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk berusia produktif terlihat lebih mendominasi. Hal ini juga terlihat dari rasio beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang mencapai 45,54%. Rasio ini menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk yang belum produktif (kurang dari 15 tahun) dan sudah tidak produktif lagi (lebih dari 64 tahun) terhadap penduduk berusia produktif (15–64 tahun). Dibandingkan dengan kondisi beberapa dekade sebelumnya, komposisi penduduk DIY terlihat semakin bergeser ke atas ditandai oleh perkembangan populasi usia muda yang cukup progresif. Hal ini mendorong peningkatan jumlah angkatan kerja berusia produktif. Kondisi ini bisa menjadi

bonus demografi yang sangat potensial untuk menggerakkan perekonomian regional jika mampu dikelola secara baik dan optimal. Sebaliknya, kondisi ini bisa menjadi beban jika tidak mampu dikelola secara optimal.

Secara umum, perkembangan nilai IPM DIY selama periode 1996–2022 menunjukkan pola yang semakin meningkat atau semakin membaik, meskipun terjadi penurunan level pada tahun 1999 dan 2020. Nilai IPM DIY pada tahun 1999 mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai level 68,70 sebagai dampak dari krisis ekonomi 1997/1998. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 memberi dampak yang luar biasa terhadap kondisi social ekonomi penduduk termasuk penduduk yang tinggal di DIY. Selama masa krisis, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sangat tajam hingga menyentuh level Rp 15.000,- per 1 US\$. Beberapa indikator makro pada level regional DIY seperti laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi selama masa tersebut juga menunjukkan gambaran yang pesimis. Laju inflasi Kota Yogyakarta tercatat mencapai level dua digit sebesar 17,72% di tahun 1997 dan kemudian meningkat tajam menjadi 77,46% di tahun 1998. Memburuknya kondisi perekonomian juga ditandai oleh pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Semua hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan daya beli (paritas) penduduk terhadap komoditas barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehingga tingkat kemiskinan juga meningkat tajam selama periode tersebut.

Beberapa indikator makro pada level regional DIY seperti laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi selama masa tersebut juga menunjukkan gambaran yang pesimis. Laju inflasi Kota Yogyakarta tercatat mencapai level dua digit sebesar 17,72% di tahun 1997 dan kemudian meningkat tajam menjadi 77,46% di tahun 1998. Memburuknya kondisi perekonomian juga ditandai oleh

pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Semua hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan daya beli (paritas) penduduk terhadap komoditas barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehingga tingkat kemiskinan juga meningkat tajam selama periode tersebut.

Penurunan daya beli penduduk yang direpresentasikan oleh nilai indeks daya beli (indeks pendapatan riil yang disesuaikan) mengalami penurunan secara nyata dibandingkan dengan tahun 1996. Meskipun komponen IPM yang lainnya seperti indeks harapan hidup dan indeks pendidikan relatif stabil atau bahkan sedikit meningkat, penurunan indeks daya beli ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan dalam mengoreksi besaran nilai indeks komposit IPM yang dihasilkan selama tahun 1999 hingga menyentuh level 68,70. Penurunan angka IPM tahun 1999 tersebut juga menjadi fenomena secara nasional. Artinya, semua provinsi di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Pasca krisis ekonomi 1997/1998, kondisi perekonomian sedikit demi sedikit semakin membaik meskipun belum sepenuhnya pulih. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian IPM DIY tahun 2002 yang sedikit meningkat menjadi 70,8. Mulai titik itu, secara berangsur-angsur IPM DIY menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat hingga mencapai level tertinggi sebesar 79,97 di tahun 2020.

Angka IPM 2020 sedikit menurun jika dibandingkan dengan kondisi 2019 (IPM sebesar 79,99) akibat dampak pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli penduduk yang ditandai oleh penurunan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Kenaikan indikator pada dua dimensi yang lain tidak mampu mengkompensasi penurunan indeks pada dimensi standar hidup yang layak sehingga level capaian IPM 2020 sedikit menurun. Secara umum, tren IPM dalam dua dekade terakhir menunjukkan pola yang meningkat. Peningkatan ini

secara kasar menggambarkan kualitas pembangunan manusia di DIY yang semakin membaik pasca krisis ekonomi 1997/1998.



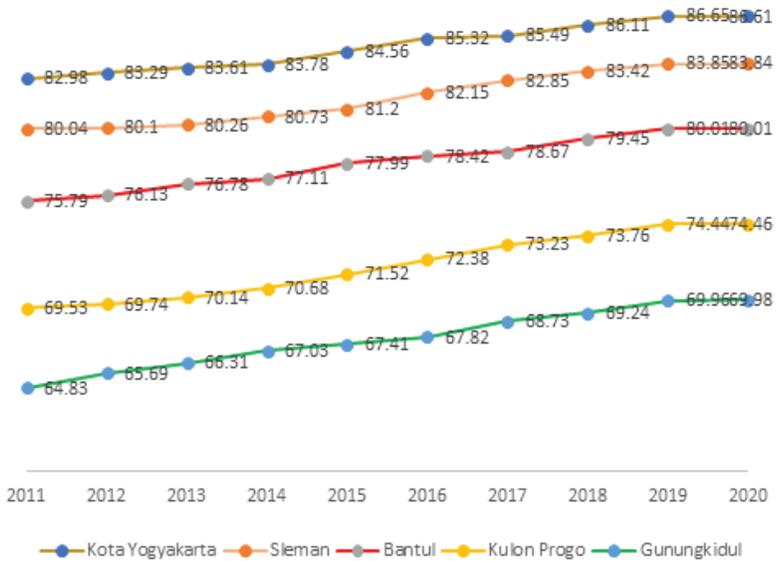
Gambar 26. Rumah sehat lansia Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta

Pencapaian posisi kualitas pembangunan manusia di DIY sampai tahun 2022 masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Perbedaan level ini terjadi karena titik awal proses pembangunan di DIY khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya terjadi lebih awal dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Penyempurnaan metode penghitungan IPM yang mulai diaplikasikan pada tahun 2010 tidak memberi pengaruh yang nyata terhadap perubahan level IPM DIY. Sebaliknya, penyempurnaan metode tersebut memberi pengaruh yang nyata terhadap penurunan level IPM nasional mulai tahun 2010. Secara level, capaian pembangunan manusia yang tertinggi dalam satu dekade terakhir tercatat di Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman. Capaian tertinggi berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Sementara itu, capaian level pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul

selama beberapa terakhir selalu berada pada posisi terendah di antara lima kabupaten/kota di DIY.

Berikut ini gambar perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY tahun 2010 – 2020.



Gambar 27. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota DIY

Perkembangan capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama periode 2010 – 2020. IPM Kota Yogyakarta pada kondisi awal tahun 2010 tercatat sebesar 82,72 dan meningkat secara bertahap menjadi 86,65 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 level IPM Kota Yogyakarta sedikit menurun menjadi 86,61 akibat penurunan daya beli penduduk selama masa pandemi. Secara level, IPM Kota Yogyakarta sudah berada dalam kriteria sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Selama periode yang sama, level IPM Kabupaten Sleman juga meningkat dari 79,69 menjadi 83,84 dan berubah status dari IPM kriteria tinggi menuju IPM sangat tinggi.

Level IPM Kabupaten Sleman selama 2020 juga sedikit menurun menjadi 83,84 akibat penurunan daya beli penduduk selama masa pandemi. Kota Yogyakarta dan Sleman termasuk dalam lima kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM tertinggi secara nasional. Bahkan, level IPM Kota Yogyakarta berada di peringkat tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, pencapaian angka IPM tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang secara relatif lebih baik dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia.



Gambar 28. Posyandu lansia di Yogyakarta



Gambar 29. Senam sehat lansia

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 36 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki IPM dalam kategori sangat tinggi (IPM>80). Selisih level IPM maupun komponen penyusun di antara 38 kabupaten/kota ini sangat tipis. Kemungkinan terjadinya pergeseran posisi dapat terjadi setiap waktu sesuai dengan tingkat kecepatan pembangunan manusia yang dicapai oleh setiap wilayah.

Gambaran pencapaian kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dengan Kota Yogyakarta atau Kabupaten Sleman menjadi sebuah perbandingan yang kontras. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar dalam hal pembangunan sosial ekonomi antarwilayah di DIY. Faktor kondisi geografis, start awal pembangunan yang berbeda, serta orientasi pembangunan yang terpusat di kawasan perkotaan turut berpengaruh terhadap pencapaian IPM antarwilayah. Ke depan, perlu dipikirkan upaya-upaya yang lebih intensif untuk mengurangi gap atau kesenjangan ini. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berbasis lokal.

Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata alam yang luar biasa sehingga jalinan kerja sama antara pemerintah selaku fasilitator dengan pihak swasta maupun masyarakat sebagai pelaku untuk pengembangan potensi ini menjadi penting untuk dilakukan secara berkelanjutan. Harapannya, potensi ekonomi baru akan bermunculan dan akan merangsang penduduk terdidik untuk mengembangkan wilayahnya dan mereduksi tingginya arus migrasi keluar.

Gambaran kecepatan perkembangan IPM kabupaten/kota di DIY selama periode 2012–2022 menunjukkan angka yang bervariasi. Pada level DIY, kecepatan perkembangan yang diukur dari rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama periode

2012–2022 tercatat sebesar 0,57%. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo yang secara level berada pada posisi paling bawah justru menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang paling cepat. Kedua kabupaten masing-masing mencatat pertumbuhan per tahun sebesar 0,77% dan 0,79%. Sementara, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun yang paling rendah masing-masing sebesar 0,51% dan 0,52%. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan salah satu kelebihan dari ukuran IPM bahwa suatu wilayah mampu berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah.

4. Perbandingan IPM DIY dengan provinsi lain di Indonesia

Perbandingan capaian pembangunan manusia antarprovinsi di Indonesia sampai tahun 2022 cukup bervariasi. Lima provinsi yang memiliki level capaian IPM tertinggi terdiri dari DKI Jakarta (81,65), DIY (80,64), Kalimantan Timur (77,44), Kepulauan Riau (76,46), dan Bali (76,44). Sebagian besar provinsi dengan level IPM tertinggi terdapat di Kawasan Barat Indonesia. Sementara, lima provinsi dengan capaian level IPM terendah terdiri dari Papua (61,39), Papua Barat (65,89), NTT (65,90), Sulawesi Barat (66,92), dan Kalimantan Barat (68,63). Kelima provinsi dengan level IPM terendah ini sebagian besar terdapat di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Secara umum, fenomena ini menggambarkan IPM di Kawasan Barat Indonesia (KBI) cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Artinya, masih adanya kesenjangan atau gap kualitas pembangunan manusia yang cukup lebar antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Titik awal proses pembangunan yang berbeda, kondisi geografis, komposisi dan persebaran penduduk, dan arah kebijakan pembangunan yang lebih dominan di kawasan Indonesia Barat memiliki pengaruh terhadap perbedaan/gap capaian IPM antarprovinsi di Indonesia. Konsekuensi ke

depan adalah harus ada kenaikan intensitas dan percepatan pembangunan manusia khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Gap atau selisih antara level IPM provinsi tertinggi dan terendah pada tahun 2022 tercatat sebesar 20,26 poin. Gap tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang tercatat sebesar 20,49 poin. Secara umum, terdapat dua provinsi yang memiliki level IPM 2022 lebih besar dari 80 atau termasuk dalam kategori IPM “sangat tinggi”. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta yang merepresentasikan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Indonesia dan D.I. Yogyakarta yang merepresentasikan pusat pendidikan. Sebagian besar level IPM provinsi lainnya berada pada kategori “tinggi” ($70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$) yaitu sebanyak 24 provinsi, sedangkan 8 provinsi lainnya termasuk dalam kategori IPM “sedang” ($60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$) dan tidak ada provinsi yang termasuk dalam kategori IPM rendah ($\text{IPM} < 60$).

Selama periode 2012–2022, semua provinsi memiliki perkembangan IPM ke arah yang semakin baik. Hal ini bisa dilihat dari besarnya nilai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun di semua provinsi yang memiliki arah positif dengan besaran yang cukup bervariasi. Pertumbuhan IPM nasional periode 2012–2022 tercatat sebesar 0,74% per tahun. Pertumbuhan IPM tertinggi atau paling cepat dicapai oleh Provinsi Papua sebesar 1,00% per tahun. Berikutnya adalah NTB sebesar 0,98% per tahun dan Sulawesi Barat sebesar 0,93% per tahun. Sementara, pertumbuhan IPM yang terendah dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,52% per tahun, diikuti oleh Kepulauan Riau sebesar sebesar 0,55%, dan DIY sebesar 0,57% per tahun.



Gambar 30. Level IPM di Indonesia (Sumber: BPS Yogyakarta, 2022)

Secara umum, terdapat kecenderungan bahwa provinsi-provinsi yang telah memiliki level IPM relatif tinggi justru memiliki rata-rata pertumbuhan IPM per tahun yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, provinsi-provinsi yang memiliki level IPM relatif rendah justru memiliki rata-rata pertumbuhan IPM per tahun yang lebih tinggi. Fenomena ini dapat dijadikan menjadi pelecut atau penyemangat bagi daerah-daerah atau provinsi/kabupaten/kota yang masih memiliki level IPM rendah untuk mengejar ketertinggalan pencapaian pembangunan manusia. Pola hubungan antara level dan pertumbuhan IPM per tahun maupun penurunan gap IPM antarprovinsi secara bertahap selama beberapa tahun terakhir bergerak semakin konvergen. Artinya, capaian pembangunan manusia antarprovinsi di era otonomi ini bergerak ke arah yang semakin merata, meskipun prosesnya tampak berjalan sangat lambat.

BAB
IV

BONUS DEMOGRAFI YOGYAKARTA

Bonus demografi adalah suatu fenomena yang ditandai oleh struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan jumlah usia belum produktif semakin kecil dan jumlah usia lanjut belum terlalu banyak. Negara Indonesia telah memasuki masa bonus demografi dan diprediksi tumbuh menjadi negara maju di usianya yang ke-100 tahun nanti. Bonus demografi terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali D.I. Yogyakarta. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020–2035. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena proporsi penduduk usia produktif umur 15 sampai dengan 64 tahun berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. Bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif.

Komposisi penduduk usia produktif yang cukup besar, tidak terkecuali di D.I. Yogyakarta, akan berperan sangat krusial. Pokok permasalahannya adalah apakah mereka benar-benar produktif? Selanjutnya seberapa besar kuantitas dan kualitas produktivitasnya? Bila hal itu dijawab dengan di area yang positif maka kesempatan emas menjadi negara maju di 2045 akan sesuai harapan. Sebaliknya, bila disia-siakan, bonus demografi akan menjadi beban negara dan bangsa. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan di atas untuk menjawabnya menjadi sangat menarik untuk menelaah variabel-variabelnya.

A. Jumlah Penduduk DIY

Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun di sisi lain, beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau malah sebaliknya, bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini didukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Substansi mendasar dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan ditemui apabila jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya pergeseran komposisi penduduk adalah tingkat kelahiran. Berbagai literatur demografi menjelaskan bahwa dinamika kependudukan di

suatu wilayah ditunjukkan dengan perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dan 2017, angka fertilitas D.I. Yogyakarta meningkat dari 2,1 menjadi 2,2. Fenomena peningkatan angka fertilitas juga terjadi di tiga provinsi lain, yaitu Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sementara angka fertilitas nasional menurun, dari 2,6 menjadi 2,4. Arti dari angka fertilitas D.I. Yogyakarta tahun 2017 adalah terdapat 2,2 kelahiran per 1000 penduduk.

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020–2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi angka kelahiran total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai proyeksi survei penduduk antarsensus (SUPAS) 2015–2045), angka kematian bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015–2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015.

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 berjumlah sekitar 3.761 ribu jiwa. Kepadatan penduduk per km² sebesar 1,2 ribu jiwa/km². Adapun rasio jenis kelamin adalah 98,02.

Dari total penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 20–24 tahun dengan jumlah sekitar 283,49 ribu jiwa. Jumlah penduduk tahun 2022 yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sekitar 1,15 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sekitar 378,9 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 2020–2022 yang paling tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo dengan laju pertumbuhan 1,94%, sedangkan laju pertumbuhan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 0,81%.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menganggur di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebesar 94.945 orang, dari total angkatan kerja sejumlah 2,33 juta orang. Komposisi jenis kelamin pada kelompok pengangguran terbuka adalah 53,14% laki-laki dan 46,86% perempuan. Jumlah pengangguran terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta di atas 15 tahun yang menganggur paling tinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 46 ribu orang.

Perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul cukup bagus. Ketiga kabupaten ini selama kurun waktu 2010 hingga 2020 rasio ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap usia penduduk produktif menurun. Sebaliknya, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mengalami kenaikan angka rasio ketergantungan. Artinya, di kedua wilayah ini pada tahun 2020 penduduk usia produktif menanggung lebih banyak penduduk usia nonproduktif dibanding tahun 2010.

Pertumbuhan usia produktif dan usia nonproduktif dari tahun 2010 ke 2020 dapat dicermati juga di tabel 16. Pertumbuhan usia produktif di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul lebih rendah dibandingkan pertumbuhan usia nonproduktifnya. Kondisisebaliknya terjadi di Sleman. Sementara di Kota Yogyakarta kelompok usia nonproduktif mengalami pertumbuhan minus, sedangkan usia produktif tumbuh positif.

**Tabel 16. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota
tahun 2010-2020**

Kabupaten/ Kota	Rasio ketergantungan		Pertumbuhan 2010- 2020		Proporsi usia produktif	
	2010	2020	Produktif	Non Produktif	2010	2020
Kulon Progo	54,39	49,04	4,81	16,25	64,77	67,10
Bantul	46,57	44,39	4,64	9,78	68,23	69,26
Gunungkidul	54,51	50,37	5,05	13,67	64,72	66,50
Sleman	41,64	43,50	6,18	1,66	70,60	69,69
Yogyakarta	35,53	40,30	5,33	-7,14	73,78	71,27
D.I. Yogyakarta	45,93	45,40	5,27	6,50	68,53	68,78

Sumber: Sensus penduduk 2010 dan 2020

B. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap bonus demografi dan pembangunan. Pertumbuhan penduduk merupakan penambahan penduduk yang diukur dalam jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam ilmu demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Disebut pertambahan penduduk alami bila hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan disebut pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengganggu keberadaan bonus demografi. Apalagi bila pertambahan penduduknya didominasi oleh usia nonproduktif. Oleh karena itu pemerintah juga harus mengontrol. Program pemerintah

yang berkaitan erat dengan kebijakan pengendalian kelahiran adalah Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB yang dirintis sejak era Orde Baru menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian angka fertilitas yang rendah sehingga penambahan penduduk terkendali.

Sementara itu penambahan penduduk yang dipengaruhi migrasi selama ini di D.I. Yogyakarta tidak menjadi masalah, artinya masih dalam kondisi normal. Pertambahan penduduk migrasi meledak bila terjadi eksodus yang biasanya diakibatkan oleh adanya kekacauan politik, bentrok antarsuku, dan sentimen SARA lainnya.

Proses pergeseran komposisi penduduk menurut umur. Selama dua dekade dari tiga kali Sensus Penduduk tampak kelompok umur muda atau produktif semakin meningkat pesat dan kelompok umur lansia meningkat perlahan, sedangkan kelompok umur nonproduktif di anak (0–14 tahun) mengalami penurunan. Hal ini berarti pula bahwa masa bonus demografi masih berlangsung hingga 2020. Diperkirakan bonus demografi terus akan berlangsung beberapa tahun ke depan bahkan hingga 2045 (BPS). Implikasi dari kondisi ini kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk membekali pengetahuan dan keterampilan serta memberi kesempatan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.

Mulai tahun 1990-an Indonesia umumnya telah memasuki bonus demografi, demikian pula dengan D.I. Yogyakarta. Bonus demografi adalah masa di mana penduduk usia produktif (15–65 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan proporsi hampir 69% dari total penduduk D.I. Yogyakarta. Menyikapi potensi yang dihasilkan dari bonus demografi ini, dalam RPJMD D.I. Yogyakarta 2017–2022 juga telah ditekankan pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga untuk menyongsong

agenda besar pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2030.

Pertumbuhan penduduk di Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul lebih berkualitas karena pertumbuhan penduduk dibarengi dengan meningkatnya jumlah proporsi usia produktif serta menurunnya rasio ketergantungan. Sementara di Sleman, jumlah penduduk meningkat dibarengi meningkatnya jumlah kelompok usia produktif tetapi secara proporsi kelompok usia produktif menurun dan berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan.

Fenomena di Kota Yogyakarta berbeda lagi, yaitu jumlah penduduknya menurun, jumlah dan proporsi kelompok usia produktif juga menurun, dan berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan. Bila ditinjau menurut konsepnya, semua kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sudah menikmati bonus demografi, yaitu proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk D.I. Yogyakarta dan juga secara umum di Indonesia sedang mengalami perubahan/pergeseran dari muda menuju dewasa muda. Hal ini ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun dan sebaliknya terjadi peningkatan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) secara perlahan, sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat cukup pesat. Proporsi usia produktif Kota Yogyakarta masih merupakan yang tertinggi, di atas 70%, meskipun proporsi angkanya menurun.

Pembangunan yang telah dicapai oleh D.I. Yogyakarta selama ini telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya tercermin dari peningkatan usia harapan hidup. Meningkatnya usia harapan hidup sendiri berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas). Sejak tahun

1990 persentase penduduk lansia D.I. Yogyakarta sudah mencapai lebih dari 10% dan pada tahun 2020 ini meningkat menjadi 15,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak 1990 D.I. Yogyakarta berada dalam masa transisi era *ageing population*. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu untuk mulai mempersiapkan kebijakan pembangunan yang responsif.

Selain merupakan aset yang menentukan kehidupan di masa depan, anak juga merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat tergantung dengan lingkungan dan orang dewasa di sekitarnya. Secara fisik anak lebih lemah demikian pula kondisi mental emosional anak yang belum stabil sehingga rawan menjadi korban kekerasan. Permasalahan mengenai anak meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya antara lain lingkungan keluarga dan pola pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, hak sipil, kebebasan dan perlindungan khusus.

C. Penyebaran Penduduk Yogyakarta

Informasi kependudukan yang mendasar adalah tentang jumlahnya, jenis kelamin, umur, agama yang dianut, dan lain-lain. Selain itu dari data dasar tersebut dapat diperoleh data turunan seperti komposisi menurut umur, komposisi menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Informasi data dasar dapat diperoleh secara lengkap bila dilakukan pendataan secara sensus yaitu metode pengumpulan data dengan objek pendataan seluruh populasi dalam wilayah cakupan pendataan.

Tabel 17. Penduduk D.I Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin

Kab/kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten Kulon Progo	216.167	220.228	436.395
Kabupaten Bantul	491.033	494.737	985.770
Kabupaten Gunungkidul	369.323	377.838	747.161
Kabupaten Sleman	559.385	566.419	1.125.804
Kota Yogyakarta	182.019	191.570	373.589
D.I. Yogyakarta	1.817.927	1.850.792	3.668.719

Sumber: Sensus Penduduk, 2020

Penduduk D.I. Yogyakarta jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia relatif kecil. Jumlah penduduk Indonesia hasil SP2020 sebanyak 270.203.917 jiwa. Penduduk D.I. Yogyakarta hanya 1,36% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Jika dilihat di Pulau Jawa, proporsi penduduk D.I. Yogyakarta sebesar 2,42% dari penduduk Pulau Jawa.

Sebaran penduduk menurut kabupaten/kota memperlihatkan bahwa Kabupaten Sleman mempunyai penduduk terbesar di antara lima kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.125.804 jiwa. Kabupaten Bantul menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 985.770 jiwa, dan urutan ketiga Gunungkidul sebanyak 747.161 jiwa. Proporsi terhadap jumlah penduduk D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman sebesar

30,69%, Bantul sebesar 26,87%, Gunungkidul sebesar 20,37%. Hal ini berarti pula bahwa sebanyak 77,92% penduduk D.I. Yogyakarta berada di ketiga kabupaten tersebut. Sementara itu, proporsi penduduk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 11,90% dan 10,18%.

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 32,50 km² kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 11.373 jiwa per km² dan tahun 2022 sebesar 11.579 jiwa per km². Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 577,22 km² (18,21%) kepadatan penduduk Kulon Progo pada tahun 2020 sebesar 756 jiwa per km² dan tahun 2022 sebesar 782 jiwa per km². Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 511,706 km² (16,14%) kepadatan penduduk Bantul pada tahun 2020 sebesar 1.926 jiwa per km² dan tahun 2022 sebesar 1.980 jiwa per km². Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 573,749 km² (18,1%) kepadatan penduduk Sleman pada tahun 2020 sebesar 1.962 jiwa per km² dan tahun 2022 sebesar 2.000 jiwa per km². Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 1.475,147km² (46,53%) kepadatan penduduk Gunungkidul pada tahun 2020 sebesar 506 jiwa per km² dan tahun 2022 sebesar 523 jiwa per km².

Persebaran penduduk yang dilihat dari kepadatan penduduk di Pulau Jawa tampak tidak ada perbedaan yang menyolok, kecuali DKI Jakarta karena merupakan ibu kota negara. Angka ini menjelaskan rata-rata jumlah penduduk dalam setiap kilometer persegi luas wilayahnya. Kondisi tahun 2020 kepadatan penduduk D.I. Yogyakarta adalah 1.171 jiwa per kilometer persegi, lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur tetapi di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Seperti halnya dengan kepadatan penduduk, angka rasio jenis kelamin, juga relatif seimbang dengan rentang angka 98,2 sampai dengan 104,0 dengan angka terendah di D.I. Yogyakarta dan tertinggi Provinsi Banten. Angka rasio jenis kelamin

kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dan ternyata pada rentang angka 95 hingga 99,3 dengan angka terendah di Kota Yogyakarta dan tertinggi di Kabupaten Bantul. Rasio jenis kelamin untuk tiga kabupaten lainnya, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul masing-masing sebesar 98,8, 98,2, dan 97,7.

Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio* – DR) merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 15 hingga 64 tahun. Sebagai indikator demografi, rasio ketergantungan diartikan sebagai ukuran jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau negara. Rasio ketergantungan D.I. Yogyakarta sebesar 45,4, lebih rendah dibanding angka tahun 2010 yang sebesar 45,9. Angka ini menjelaskan bahwa dari setiap 100 orang usia produktif (15–64 tahun) menanggung 45 orang usia nonproduktif. Artinya, di D.I. Yogyakarta ada kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Bonus demografi ini dapat merupakan keuntungan atau dapat juga menjadi ancaman bagi ekonomi D.I. Yogyakarta. Bonus demografi menguntungkan bila penduduk usia 15–64 tahun merupakan penduduk yang berkualitas dan produktif. Sebaliknya, bonus demografi menjadi ancaman apabila penduduk yang di usia 15–64 tahun tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga malah menjadi beban penduduk lainnya. Secara eksternal ancaman bonus demografi akan mengurangi daya saing D.I. Yogyakarta.

Di Pulau Jawa, rasio ketergantungan D.I. Yogyakarta tahun 2020 merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta dengan rasio ketergantungan 39,7 menjadi paling menguntungkan bila bonus demografi yang dicapai mencerminkan penduduk yang di usia 15–64 tahun merupakan

penduduk yang berkualitas dan produktif. Sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten mempunyai angka rasio ketergantungan sekitar 42–43.

Rasio ketergantungan akan dibahas lebih mendalam dan menarik di kelompok umur muda dan juga kelompok umur lansia. Pembahasan pada kelompok umur tersebut juga akan dapat menjelaskan pada angka di level kabupaten/kota rasio ketergantungan suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang sedang mempersiapkan usaha tetapi usahanya belum mulai berjalan, mereka yang sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), selanjutnya lebih populer disebut tingkat pengangguran, didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Manfaat yang didapat dari angka pengangguran adalah untuk mengevaluasi keberhasilan program ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Demikian pula dalam menyusun perencanaan pembangunan dapat menjadi acuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru. Tingkat pengangguran D.I. Yogyakarta kondisi Agustus 2020 sebesar 4,57% dan merupakan yang terendah di Pulau Jawa. Jawa Tengah yang merupakan provinsi terdekat, angka penganggurannya 6,48%. Sebaran tingkat pengangguran lebih rinci di tingkat kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran cenderung menurun. Namun, pandemi Covid-19 membuat angka pengangguran cenderung meningkat. Kota Yogyakarta merasakan dampak yang sangat berat karena angka pengangguran meningkat tajam, dari 4,8% di tahun 2019 menjadi 9,16% di tahun 2020. Sementara kabupaten lain meskipun terdampak juga tetapi angka pengangguran masih di bawah 6%.

Angka pengangguran akan dibahas lebih rinci menurut kelompok umur, pendidikan, daerah perkotaan dan pedesaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah PDRB rata-rata per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan nyata ekonomi per orang/kapita penduduk suatu daerah. PDRB per kapita D.I. Yogyakarta tahun 2020 sebesar 35,6 juta rupiah, atau 2,97 juta rupiah per bulan. Bila PDRB terdistribusi relatif merata maka PDRB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran. Namun, pada kenyataannya terdapat ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk. Posisi PDRB per kapita D.I. Yogyakarta terendah di Pulau Jawa, sedangkan yang tertinggi di DKI Jakarta. PDRB per kapita Jawa Tengah sebesar 38,60 juta rupiah dan posisinya terendah kedua setelah D.I. Yogyakarta.

Perkembangan PDRB per kapita kabupaten/kota selama sepuluh tahun terakhir sangat pesat dan semua kabupaten/kota meningkat drastis. Kulon Progo meningkat 107,7%, Bantul naik 90,7%, Gunungkidul naik 93,9%, Sleman naik 91,0%, dan Kota Yogyakarta naik 84,8%. Berpijak pada dua tahun pengamatan ini juga memperlihatkan kesenjangan yang semakin melebar antara Kota Yogyakarta dengan kabupaten/kota lain. Kondisi demikian dapat menjadi acuan pemerintah untuk menggenjot pembangunan dan meningkatkan investasi di empat kabupaten lain, terutama di Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo.

D. Usia Harapan Hidup

Indikator usia harapan hidup (UHH) penduduk pada saat lahir (eo) merepresentasikan dimensi kesehatan, yakni umur yang panjang dan hidup yang sehat. Indikator UHH tercatat meningkat dari 74,36 tahun pada kondisi tahun 2012 menjadi 75,08 tahun pada tahun 2022. Angka sebesar 75,08 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang

dilahirkan hidup di DIY pada tahun 2022 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Nilai indeks harapan hidup selama periode yang sama juga meningkat dari 83,64 menjadi 84,74. Nilai indeks usia harapan hidup memberi kontribusi yang lebih besar terhadap IPM DIY dibandingkan dengan nilai indeks kedua komponen penyusun IPM yang lain, yakni indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran perkapita riil disesuaikan.

Secara umum, peningkatan usia harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik. Terlebih pada kelompok bayi dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) serta kelompok wanita yang berusia produktif. Usia harapan hidup penduduk DIY sampai tahun 2022 masih menempati peringkat tertinggi secara nasional diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Fenomena meningkatnya usia harapan hidup penduduk DIY tidak terlepas dari faktor ketersediaan infrastruktur kesehatan yang cukup representatif. Persebaran infrastruktur sarana kesehatan sudah relatif merata sampai wilayah perdesaan. Tingkat aksesibilitas menuju sarana kesehatan yang tersedia juga relatif semakin mudah.

Upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan dan mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkualitas semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Upaya tersebut juga ditopang oleh peningkatan layanan kesehatan dasar secara adil dan merata bagi semua penduduk yang tinggal di seluruh wilayah DIY. Secara tidak langsung, upaya-upaya tersebut mampu mendorong berkurangnya jumlah kasus kematian bayi dan balita serta mendorong peningkatan usia harapan hidup penduduk secara umum. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka harapan hidup di DIY

adalah meningkatnya kualitas pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terutama pada kelompok wanita berusia produktif. Faktor sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat juga turut memberi kontribusi. Gaya hidup (*life style*) sebagian besar penduduk yang dikenal *low profile* dan “*nrima*” sangat berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan secara umum. Faktor-faktor tersebut juga ditopang oleh stabilitas sosial, tensi politik, tingkat keamanan wilayah, dan suasana hidup yang *adhem ayem* secara tidak langsung memengaruhi panjangnya usia harapan hidup.

Selama periode 2010–2020, jumlah infrastruktur rumah sakit baik pemerintah maupun swasta meningkat pesat dari 63 unit menjadi 82 unit rumah sakit. Rinciannya adalah 61 rumah sakit umum dan 21 rumah sakit khusus. Selain itu, juga tersedia fasilitas rumah sakit bersalin sebanyak 13 unit. Peningkatan jumlah rumah sakit juga diiringi oleh peningkatan kapasitas tempat tidur yang rata-rata meningkat di atas 3,5% per tahun. Jika dikoreksi dengan jumlah penduduk, maka rata-rata kapasitas tempat tidur yang tersedia di rumah sakit umum dan khusus adalah 1,8 tempat tidur untuk setiap 1.000 orang penduduk. Namun demikian, tidak semua penduduk yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan dapat langsung dan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Alasannya adalah ketersediaan sarana yang belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan dan tidak semua jenis penyakit harus ditangani di fasilitas rumah sakit.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis wilayah kapanewon yang dekat dengan tempat tinggal penduduk serta berbiaya murah dengan sistem berjenjang yang dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk menjangkau daerah yang sulit dan terpencil, pemerintah juga

mengintensifkan peran puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta mengaktifkan peran posyandu dan bidan desa pada level pedukuhan untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan penduduk lansia. Sampai dengan tahun 2022, tercatat sebanyak 121 unit puskesmas di seluruh DIY. Sebanyak 49 unit puskesmas telah memiliki ruang rawat inap dan 72 sisanya belum memiliki ruang rawat inap. Secara rata-rata terdapat 1–2 unit puskesmas di setiap kapanewon di wilayah DIY dan setiap puskesmas rata-rata melayani sekitar 30.000 penduduk. Sementara, jumlah puskesmas pembantu dan puskesmas keliling tercatat sebanyak 440 unit serta posyandu sebanyak 5.724 unit.

Penyelenggaraan aktivitas kesehatan masyarakat juga ditopang oleh peran pihak swasta untuk ikut serta dalam menyediakan infrastruktur maupun jasa pelayanan kesehatan sampai wilayah terpencil. Untuk mempermudah jangkauan pelayan kesehatan pemerintah juga menempatkan tenaga kesehatan, yakni bidan desa. Berdasarkan hasil Susenas dalam beberapa tahun terakhir, persentase kelahiran bayi di DIY yang ditangani oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan perawat) sudah mendekati angka 100% dan sebagian besar tempat persalinan juga telah dilakukan di sarana kesehatan yang tersedia.

Ketersediaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang mudah, murah, dan representatif diyakini menjadi syarat yang diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut belum menjadi syarat kecukupan. Artinya, masih ada aspek yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membayar jasa layanan kesehatan yang diaksesnya. Daya beli yang dimiliki setiap penduduk berbeda-beda. Penduduk pada golongan berpendapatan terendah atau rumah tangga miskin yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan layanan kesehatan

dicakup oleh subsidi pemerintah melalui sistem jaminan sosial oleh BPJS kesehatan dan berbagai variasi kebijakan yang serupa. Dalam implementasinya, rumah tangga yang dicakup oleh BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih sangat terbatas, sehingga beberapa pemerintah daerah mengambil inisiatif kebijakan untuk memperluas cakupan sasaran penerima manfaat pelayanan kesehatan menggunakan dana dari APBD wilayah masing-masing atau mendorong partisipasi penduduk secara mandiri dalam program jaminan Kesehatan oleh BPJS non PBI. Upaya-upaya tersebut senantiasa dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin dan memperluas aspek pemerataan dalam menjangkau dan mengakses fasilitas kesehatan dasar bagi semua golongan penduduk.

Peningkatan derajat kesehatan penduduk yang ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup juga memiliki relasi yang kuat dengan kualitas pendidikan, terutama pendidikan ibu dan wanita berusia produktif. Semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, maka pemahaman mengenai pentingnya sanitasi, gizi keluarga, kesehatan reproduksi, tata cara perawatan selama masa kehamilan maupun perawatan bayi pascakelahiran, pengetahuan tentang penyakit menular serta pencegahannya, dan persepsi tentang usia reproduksi serta ukuran keluarga yang ideal juga akan semakin meningkat. Pada akhirnya, peningkatan pengetahuan tersebut akan menjadi variabel antara yang dapat mengurangi jumlah kasus kematian bayi dan ibu yang terjadi selama masa persalinan maupun kematian anak dan ibu pascapersalinan. Data kematian bayi di DIY mengalami penurunan secara signifikan dari 24 kematian per 1000 kelahiran hidup di tahun 2000 (Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000) menjadi 16 kematian per 1000 kelahiran hidup (Hasil Sensus Penduduk 2010) dan 17 kematian per 1000 kelahiran hidup (Hasil SDKI 2017). Penurunan jumlah kasus kematian bayi inilah yang menjadi

penyebab langsung peningkatan usia harapan hidup penduduk DIY pada saat lahir.

BAB
V

DEMOGRAFI WISATAWAN

Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia. Hal ini karena dukungan dari pelbagai faktor seperti, sejarah dan kebudayaannya. Pembangunan pariwisata di Yogyakarta sekarang tentu tidak lepas dari upaya-upaya awal pemerintah dalam mengembangkannya pascakemerdekaan. Pembangunan pariwisata seiring dengan upaya pemerintah memulihkan perekonomian daerah yang rusak pascaperang. Ulasan bab ini berfokus pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun kembali pariwisata di Yogyakarta.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 lalu membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, terutama sektor pariwisata. Di D.I. Yogyakarta, sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan, juga terdampak akibat wabah ini. Pandemi Covid-19 menyebabkan pariwisata terpuruk di semua industri pariwisata terutama hotel,

penginapan, akomodasi, restoran, dan objek wisata, bahkan ada sebagian yang kemudian berhenti beroperasi.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang ditutup akibat pandemi virus corona sehingga menyebabkan pendapatan suatu daerah menurun. Untuk itu perlu adanya usaha-usaha peningkatan aktivitas pariwisata yang juga tidak mengesampingkan protokol kesehatan yaitu dengan upaya *recovery*. Pariwisata Kota Yogyakarta mengandalkan pendapatan salah satunya dari akomodasi dalam hal penginapan atau hotel. Penginapan yang terdapat di kota Yogyakarta sangat beragam dan menjamur, mulai dari losmen hingga hotel berbintang mewah. Kehadiran Covid-19 merubah segalanya tak terkecuali dari wisatawan yang menginap di kota Yogyakarta untuk berwisata. Akomodasi dalam hal hotel membuat pelaku industri pariwisata menjadi merugi akibat Covid-19. Objek wisata pun tutup untuk menghindari penyebaran virus ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY memiliki tugas untuk melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut data perkembangan jumlah pengunjung daya tarik wisata di Yogyakarta Tahun 2015–2019 menunjukkan statistik yang menurun dari 5.621.265 menjadi 4.216.601. Kemudian pada awal tahun 2020 terjadi wabah pandemi menular yang berdampak pada jumlah pengunjung di Yogyakarta pada tahun 2020 (Buku Statistik Kepariwisataaan DIY, 2020).

Data yang dikutip dari BPS DIY dalam laporan tamu menginap di hotel berbintang pada bulan April 2020 hanya 18.521 orang yang jumlah tersebut merupakan paling terendah jika dibandingkan bulan-bulan lain di tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan

gabungan dari wisatawan dalam dan luar negeri yang menginap di hotel berbintang. Pada bulan-bulan tahun 2020 mengalami wabah Covid-19 yang menyebabkan sektor pariwisata menjadi terganggu. Dampak pandemi di sektor pariwisata cukup besar sehingga perlu melihat strategi dinas pariwisata mengatasi permasalahan tersebut.

Tren penurunan wisatawan karena adanya imbauan pemerintah pusat agar masyarakat berdiam diri di rumah karena Covid-19 sangat berbahaya. Provinsi D.I Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta, merasa terpukul karena kunjungan wisatawan menurun yang menyebabkan pendapatan menjadi berkurang. Oleh karena itu dibutuhkan strategi *recovery* pariwisata untuk mengembalikan pariwisata di tengah pandemi.

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di Indonesia khususnya di sektor ekonomi. Pariwisata terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah pariwisata berbasis budaya. Pariwisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Setiap destinasi wisata harus memiliki sisi unik masing-masing. Semakin khas dan menarik tempat wisata, diyakini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung. Destinasi biasa saja dapat ditemui di mana pun. Oleh karena itu, harus dicari keunikan yang bisa menguatkan karakter sehingga dapat meningkatkan daya saing serta daya tarik itu sendiri.

Sebagai provinsi tujuan wisata kedua setelah Bali, Yogyakarta telah mencanangkan Visi Pembangunan Wisata yang mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata berkelas dunia, berdaya saing, berwawasan budaya, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Yogyakarta juga mengusung moto “*Jogja Cultural Experiences*” yang menjadikan budaya sebagai karakter

pariwisata Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan target Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan kebudayaan dan daerah terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Kepedulian masyarakat Yogyakarta didukung pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan sehingga kebudayaan terpelihara secara turun temurun. Pelestarian budaya pun telah dilakukan oleh berbagai generasi. Berkaca dari negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kebudayaan di negeri tersebut tetap dijunjung tinggi. Tujuannya adalah sama, yakni menjadikan budaya sebagai cermin pengambilan kebijakan pembangunan. Tak heran bila dalam pengambilan kebijakan pembangunan di zaman modern ini tak boleh melanggar nilai-nilai budaya.

Kehidupan masyarakat Yogyakarta telah mencerminkan pelestarian kebudayaan. Tempat bersejarah telah menjelma menjadi daya tarik wisatawan. Wisata budaya ini memperkaya destinasi wisata yang ada di Yogyakarta. Wisata budaya tersebut berupa pertunjukan kebudayaan seperti tari-tarian, makanan tradisional, pakaian khas, bangunan bersejarah, dan sebagainya. Bahkan dengan berbasis masyarakat lokal, saat ini juga ada wisata dengan mengusung konsep desa/kampung wisata.

Situs wisata sejarah hingga nuansa bangunan masa lalu yang sudah ada sejak turun temurun, jika dirawat dengan seksama bisa menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi unggulan pariwisata dan budaya setelah Bali. Sebagai contoh, kawasan pecinan di Ketandan dengan budaya Barongsai pada saat perayaan Imlek, lima Kawasan Cagar Budaya (KCB) yaitu Kotabaru, Kotagede, Pakualaman, Malioboro dan Keraton dengan keunikan gaya bangunan masa lalu dan seni kerajinan. Wisata budaya tersebut harus terus dilestarikan karena memiliki daya tarik tinggi bahkan dapat dibaurkan dengan budaya modern seperti yang dilakukan

Korea Selatan atau Jepang dalam promosi kebudayaannya.



Gambar 31. Gedung BNI 1946 di Titik Nol Yogyakarta



Gambar 32. Titik Nol D.I. Yogyakarta

Dari sisi wisata sejarah, sumbu filosofi Kota Yogyakarta yakni dari Gunung Merapi, Tugu Pal Putih, Keraton, Panggung Krpyak hingga Laut Selatan, sedang diajukan sebagai warisan dunia ke UNESCO. Ini menjadi hal lain yang membuat Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta memang perlu serius menggarap dan

melestarikan pariwisata dan budaya agar nyaman dikunjungi. Dengan modal pariwisata yang cukup kompleks, perwujudan Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata akan terwujud bila masyarakat Kota Yogyakarta mampu memelihara kebudayaan dan menciptakan inovasi pengembangan wisata. Kelak, ini akan memberikan sumbangan besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.

A. Inovasi Penciptaan Produk Wisata

Berdasarkan Perwal Yogyakarta No. 115 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kampung Wisata bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kepariwisataan yang berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi, kerajinan dan kuliner, maka perlu adanya program dan kegiatan pada Kampung Wisata di Yogyakarta dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Kampung Wisata. Di Yogyakarta terdapat ratusan desa/kampung wisata yang masing-masing mempunyai potensi daya tarik tersendiri. Tujuan dari adanya desa wisata tidak lain adalah agar masyarakat setempat langsung dapat menikmati keuntungan dengan pengembangan wisata. Pariwisata mampu menumbuhkan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi, membuka lapangan pekerjaan seperti perdagangan, usaha makan-minum, akomodasi penginapan dan sektor usaha jasa pariwisata lainnya.

Citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya dengan warganya yang ramah, murah senyum, dan responsif menjadi salah satu daya tarik. Kondisi ini perlu direspon dengan pembenahan sektor pariwisata dan budaya Yogyakarta secara konsisten. Dukungan dana yang lebih besar diperlukan untuk pembenahan agar kehidupan perekonomian warga Yogyakarta semakin baik ke depannya. Pemerintah Daerah Propinsi D.I

Yogyakarta sendiri telah membenahi infrastruktur, seperti bangunan bernuansa Jawa serta tampilan seni tradisional di sepanjang Malioboro bersama DIY dalam hal ini Gubernur dengan dana istimewanya. Dukungan dan komitmen yang serius dari Pemda DIY dalam membenahan pariwisata dan budaya memang dapat memperkuat pelestarian budaya yang selama ini selalu digaugkan.

1. Desa wisata: rintisan, berkembang, maju, dan mandiri

Perkembangan pariwisata desa di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an ketika wisatawan mulai melirik alternatif lain dalam berwisata yaitu obyek atau daya tarik pedesaan dan daerah pedalaman yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Perjalanan wisata bukan hanya bagian dari kegiatan santai, *rest and relax*, tetapi juga telah berkembang menjadi petualangan baru untuk mengenali dan mempelajari jejak peradaban dunia. Semakin banyak kunjungan ke kawasan pedesaan menyebabkan setiap desa mulai mempersiapkan diri. Selanjutnya, pengembangan gagasan desa wisata mulai tumbuh sekitar tahun 2000.

Desa wisata dapat dikategorikan menjadi 4 kategori menurut pengembangannya, yakni: rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.

a. Desa wisata rintisan

Desa wisata rintisan merupakan desa wisata yang masih berupa potensi sebagai desa wisata. Sarana prasarana desa wisata rintisan terbilang terbatas sehingga belum maupun masih sedikit kunjungan dari wisatawan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum sepenuhnya tumbuh. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dari pihak terkait dalam pengembangannya ke depan.

b. Desa wisata berkembang

Desa wisata berkembang yang merupakan desa wisata

yang sudah ada kunjungan dari wisatawan dari luar daerah. Sarana prasarana dan fasilitas juga sudah berkembang sehingga mulai tercipta lapangan kerja bagi penduduk daerah. Selain itu juga didukung akan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata tumbuh. Walaupun sudah berkembang, desa wisata kategori ini masih tetap perlu pendampingan pihak terkait secara berkala.

c. Desa wisata maju

Desa wisata maju adalah desa wisata yang masyarakatnya sadar akan potensi wisata yang ada di daerahnya. Desa wisata maju sudah banyak dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara sehingga masyarakat mampu mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis maupun kelompok kerja lokal. Pada kategori ini desa wisata sudah mampu memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata.

d. Desa wisata mandiri

Kategori keempat desa wisata adalah desa wisata mandiri yang memiliki inovasi dalam pengembangan potensi desa menjadi unit kewirausahaan mandiri. Desa ini banyak dikenal wisatawan mancanegara dan menerapkan konsep berkelanjutan (*sustainability*) yang diakui dunia. Sarana dan prasarana menerapkan standar internasional, minimal ASEAN serta pengolahannya secara kolaboratif *pentahelix* (multipihak). Desa wisata mandiri memanfaatkan dana desa menjadi bagian dalam inovasi wisata. Selain itu digitalisasi menjadi bentuk promosi mandiri dalam mempromosikan wisata di desa.

Konsep *pentahelix* (multipihak) di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen

untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menemukan pola kemitraan dalam pengembangan potensi suatu kawasan yaitu dengan melibatkan multipihak yang saling bersinergi. Melalui pola kemitraan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, perbaikan lingkungan hidup serta membangun kesadaran atas keberadaan potensi wilayah.

Saat ini ada kecenderungan tiru meniru, di mana semua desa berlomba-lomba menjadi desa wisata. Beberapa kasus desa wisata yang sudah ditetapkan tetapi dalam perjalanannya mati suri dan salah satu penyebabnya adalah kegagalan dalam pengelolaan. Menurut Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI), jumlah desa wisata di Indonesia tahun 2020 sekitar 1.838 desa wisata.



Gambar 33. Gapura Kampoeng Ketandan (Pecinan) Yogyakarta

Terkait dengan pengembangan wisata di desa terdapat dua konsep yang dipakai yaitu wisata pedesaan (*village tourism*) dan desa wisata (*tourism village*). Wisata pedesaan adalah kegiatan wisata yang hanya menekankan kegiatan wisata di objek wisata yang ada di desa dan kegiatan wisata tersebut tidak terfokus pada kegiatan masyarakat di dalamnya (Kemenparekraf, 2020). Sementara desa wisata (*tourism village*) menekankan pada interaksi dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian desa wisata. Menurut Hadiwijoyo (2012), desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan minuman dan kebutuhan wisata lainnya.

Pengertian yang serupa datang dari pakar pariwisata asal UGM, Wiendu Nuryanti, yang menjelaskan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Hal senada disampaikan Nuryanti (Yuliati & Suwandono, 2016) bahwa desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata.

Berikut ini kategori desa wisata menurut Nuryanti (Yuliati & Suwandono, 2016), dibedakan menjadi 2, yakni:

- a. Desa wisata hijau

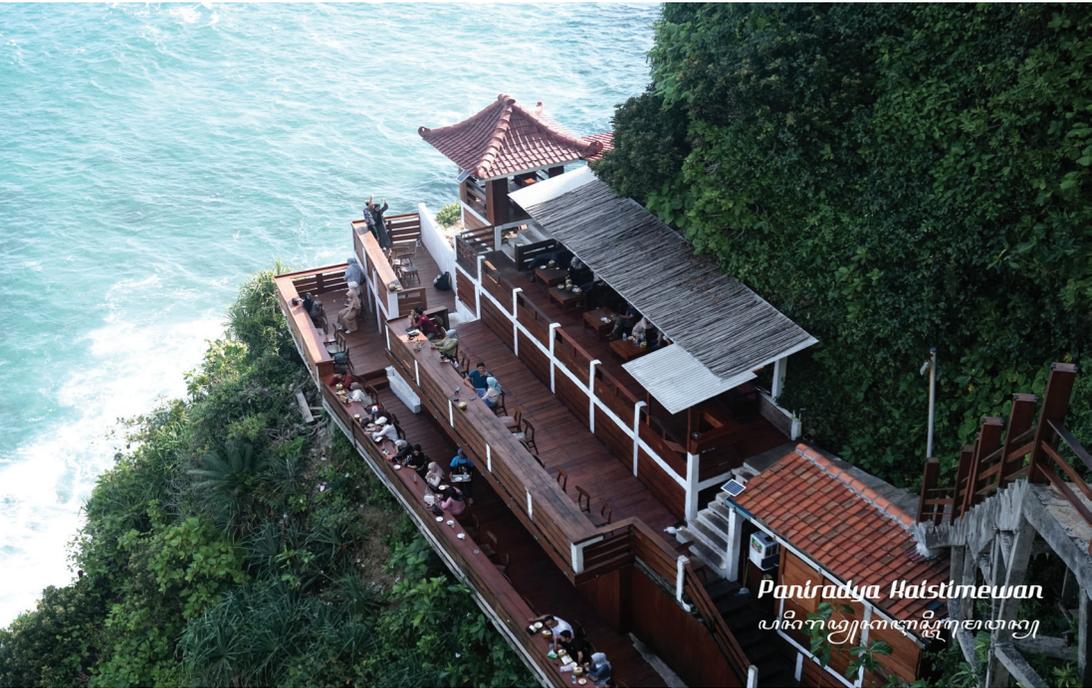
Pengembangan lebih lanjut agar desa wisata semakin

ramah lingkungan, maka pemerintah meluncurkan konsep Desa Wisata Hijau yang merupakan kolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait lainnya seperti Bappenas, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Koperasi serta Kementerian Parekras sendiri di samping kalangan perguruan tinggi. Desa Wisata Hijau merupakan desa wisata yang dikembangkan dengan model pemberdayaan masyarakat lokal dengan produk utama mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan alam, ekonomi dan sosial budaya setempat. Penggunaan kata hijau dalam desa wisata mengandung pengertian pengelolaan kegiatan pariwisata merupakan kombinasi antara kegiatan produksi dengan pelestarian alam dan budaya dan praktik pariwisata yang ramah lingkungan.

b. Desa wisata tematik

Konsep desa wisata tematik merupakan pengembangan selanjutnya dari desa wisata dengan memperhatikan potensi unggulan yang akan ditawarkan kepada pengunjung yang berbeda dengan desa lainnya. Desa dikemas dan dikembangkan sebagai destinasi wisata bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman unik dan luar biasa sebagaimana penduduk setempat menjalani kehidupannya. Setiap desa wisata mengusung tema khusus yang menunjukkan keunikan tersendiri. Keunikan ini sesungguhnya merupakan salah satu kriteria desa wisata yaitu adanya potensi objek wisata yang menjadi andalan yang akan diangkat sebagai tema, seperti tema budaya, kreatif atau kampung kreatif, kerajinan atau kuliner khas, jika desa wisata punya potensi budaya atau ekonomi kreatif yang kuat. Desa wisata tematik alam untuk desa wisata yang memiliki potensi wisata alam

yang unggulan, seperti pantai, gunung, air terjun, danau, lembah, dan sebagainya.



Gambar 34. Puncak Segoro Gunungkidul

2. Pokdarwis di Yogyakarta

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat saat ini tumbuh dan berkembang pesat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang mampu mengembangkan potensi pariwisata dan perekonomian di wilayahnya. Pertumbuhan dan perkembangan Pokdarwis di DIY sangat pesat, bahkan sangat mengembirakan, melebihi ekspektasi pemerintah.

Tabel 18. Jumlah desa wisata dan Pokdarwis

No	Sub Elemen	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa Wisata	270	282	286	305
	Desa Wisata Rintisan	-	-	-	100
	Desa Wisata Berkembang	39	33	39	54
	Desa Wisata Maju	48	60	31	37
	Desa Wisata Mandiri	-	-	-	14
2	Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di DIY	131	131	164	81
	Kabupaten Gunungkidul	42	42	42	18
	Kabupaten Kulon Progo	20	20	20	3
	Kabupaten Sleman	15	15	48	13
	Kabupaten Bantul	40	40	40	8
	Kota Yogyakarta	14	14	14	39

Sumber: bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/211-desawisata-dan-pokdarwis

Pada tahun 2021 di DIY jumlah Pokdarwis mencapai 164 lebih yang di dalamnya terdapat “*homestay*” yang jumlahnya mencapai 1.800 lebih dengan jumlah kamar mencapai 3.800 lebih. Namun, pada tahun 2022 jumlahnya berkurang cukup dratis, dampak terjadinya covid-19 yang melanda dunia, sehingga sektor pariwisata terpuruk.

Sadar wisata memberikan motivasi untuk membangun daerahnya menjadi ekosistem wisata berdasar Sapta Pesona. Harus ditekankan bagaimana sebuah Pokdarwis membangun infrastruktur dan lingkungan yang mampu menjadi daya tarik untuk wisatawan. Sesuai dengan Sapta Pesona, satu hal yang harus menjadi perhatian dan hal itu perlu dikelola dengan baik adalah kenangan. Dengan memberikan kenangan yang berharga

bagi wisatawan akan menjamin kunjungan wisata itu meningkat.

Kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke D.I. Yogyakarta adalah wisatawan yang datang kembali. Artinya adalah mereka bukan wisatawan baru, tapi mereka pernah datang dan kembali berkunjung ke Yogyakarta. Mendapatkan kesan atau kenangan yang baik itu dapat menjadi sebuah pemicu sehingga satu wisatawan ketika berkunjung akan membawa wisatawan lain. Efek inilah yang selalu dorong ke semua Pokdarwis di DIY. Para wisatawan harus betul-betul dihargai sehingga mereka tidak kapok berkunjung lagi.

Keberadaan Pokdarwis diharapkan dapat merespon permintaan pasar, di mana saat ini masyarakat Asia dan Eropa sedang melirik *ecotourism*. Istilah '*ecotourism*' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain. Hakikat *ecotourism* atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ke tempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan, dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini.

Rumusan di atas hanyalah penggambaran tentang kegiatan wisata alam biasa. Rumusan ini kemudian disempurnakan oleh *The International Ecotourism Society* (TIES) pada awal tahun 1990. Dalam penyempurnaannya, pariwisata ekologis dimaknai sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat alami sembari menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Perlu persiapan untuk menghadapi era *ecotourism*. Selain menata destinasi, juga menata infrastruktur termasuk fasilitas pendukung. Kesemuanya itu harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tantangan terberat dalam mengelola Pokdarwis adalah mengubah pola pikir masyarakat.

Jika masyarakat tidak diberikan contoh dan tidak menghasilkan dipastikan mereka akan susah diajak berperan serta dalam pengembangan desa wisata. Di masa mendatang, destinasi wisata yang melibatkan masyarakat akan terus dikembangkan karena banyak destinasi wisata yang dikelola swasta maupun pemerintah. Sebagai contoh keterlibatan masyarakat untuk mengelola Tebing Breksi. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari objek wisata tersebut. Mereka banyak terlibat mengelola Tebing Breksi, baik itu menjadi pengelola, pedagang makanan, persewaan jip atau ATV dan lain sebagainya.

B. Fasilitas Pendukung/ Daya Tarik Objek Wisata

Kurangnya atau tidak memadainya fasilitas penunjang yang ada di tempat wisata dapat berdampak pada sepi pengunjung. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas dari destinasi wisata ialah memberikan fasilitas lengkap untuk seluruh wisatawan. Fasilitas pariwisata inilah yang nantinya dapat mendukung terciptanya kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata. Pariwisata di D.I. Yogyakarta merupakan salah satu aspek penting yang menunjang perekonomian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata ke arah yang lebih baik. Salah satu solusi untuk membangun pariwisata ke arah yang lebih baik adalah dengan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) ini merupakan konsep pengembangan pariwisata dengan memperhitungkan serta memperhatikan keseluruhan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Maka dari itu, memperbaiki fasilitas yang tidak terawat dan membangun fasilitas lain di tempat wisata menjadi salah satu usaha untuk mengembangkan wisata.

Faktanya masih banyak ditemukan beberapa destinasi wisata di D.I. Yogyakarta yang tidak memiliki fasilitas umum yang lengkap sehingga menyulitkan wisatawan. Bahkan ada juga yang sudah memiliki fasilitas penunjang, tetapi tidak dirawat dengan baik dan dibiarkan kotor begitu saja. Jika disediakan fasilitas yang lengkap, destinasi ini dapat memudahkan serta membuat wisatawan nyaman saat berlibur.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengenai salah satu pilar yang ada dalam pembangunan kepariwisataan yakni pembangunan destinasi pariwisata. Di dalam pembangunan destinasi pariwisata mencakup pembangunan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, prasarana dan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.

Fasilitas pendukung di tempat wisata akan mampu menciptakan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan. Beberapa fasilitas penunjang yang dibutuhkan di destinasi wisata, sebagai upaya untuk pengembangan pariwisata ke arah yang lebih baik antara lain sebagai berikut.

1. Fasilitas toilet yang memadai

Untuk setiap tempat wisata sudah seharusnya memiliki toilet yang memadai. Bukan hanya dari segi jumlahnya yang banyak, melainkan juga kebersihan yang terawat dengan baik sehingga wisatawan nyaman menggunakannya. Pada kenyataannya, banyak sekali destinasi wisata yang menyediakan toilet dengan kondisi yang memprihatinkan, atau dalam kata lain tidak bersih dan tidak terawat. Memiliki tim yang mengatur kebersihan toilet sudah seharusnya dimiliki oleh tempat wisata. Pihak pengelola wajib mengatur kebersihan dari fasilitas paling penting di destinasi wisata ini. Ketika toilet bersih dan wangi, pengunjung pun merasa nyaman untuk berlama-lama di tempat tersebut.

2. Tempat sampah

3. Ketersediaan fasilitas tempat sampah di lokasi wisata sampai

saat ini masih menjadi catatan penting bagi pengelola tempat wisata. Seperti yang kita ketahui, permasalahan sampah di tempat wisata masih menjadi hal penting yang perlu diatasi. Sampah-sampah plastik banyak sekali ditemukan berserakan karena dibuang ke sembarang tempat. Bahkan untuk tempat wisata alam seperti laut, banyak sekali ditemukan sampah plastik yang dibuang ke laut. Jika dibiarkan terus-menerus hal tersebut dapat mencemari laut. Apabila laut tercemar, maka akan berdampak besar pada rusaknya ekosistem laut. Oleh sebab itu, kesadaran membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan sampah plastik harus terus digalakkan.

Pemrosesan akhir sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman telah dilakukan bersama dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang terletak di Dusun Ngablak dan Watugender, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dan biasa disebut TPA Piyungan.



Gambar 35. TPST Piyungan Bantul Yogyakarta

TPA Piyungan atau tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan, dibangun pada tahun 1994-1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemda DIY dan mulai Tahun 2000 dikelola oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul berdasarkan Keputusan Gubernur No. 18. Tahun 2000. Sejak 1 Januari 2015 TPA Piyungan diambil alih

oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan air Minum, di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2014. Mulai Tahun 2019 Pengelolaan TPA Piyungan dialihkan pada Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Dalam hal pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan TPST Piyungan, melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Masyarakat jangan hanya mengandalkan TPST yang sudah ada. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mengelola sampah pada tingkat RT, padukuhan, hingga kalurahan sangat diperlukan sehingga seluruh pihak bisa mengelola sampah di lingkungan masing-masing untuk menuju zero residu.

Pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi dua, yakni: pertama, pengelolaan sampah rumah tangga; dan kedua, pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah rumah tangga dilakukan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah oleh masing-masing keluarga. Pengurangan dan penanganan sampah meliputi: pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi: pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA. Pengelolaan sampah spesifik yaitu pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya

masing-masing. Pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (reuse, replacement, dan recycling) perlu diterapkan dengan baik.

4. Fasilitas ramah difabel

Seluruh destinasi wisata merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh siapa saja, termasuk bagi teman difabel. Namun ketersediaan fasilitas penunjang bagi difabel di destinasi wisata masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan tambahan fasilitas di setiap destinasi wisata yang ramah difabel. Adanya petugas yang menguasai bahasa isyarat hingga toilet khusus difabel. Bahkan peraturan mengenai fasilitas difabel terkait toilet juga telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 60 Tahun 2006. Dengan adanya fasilitas ramah difabel ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keselamatan bagi wisatawan difabel.



Gambar 36. Bendung Lepen Umbulharjo Yogyakarta

5. Ketersediaan ruang hijau

Adanya ruang hijau di tempat wisata juga akan membantu untuk menyediakan udara yang sejuk dan asri di sekitar tempat

wisata. Hal itu juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Banyaknya tumbuhan dan tanaman hijau dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Ruang hijau ini akan diletakkan pada titik-titik tertentu di sekitar tempat wisata agar memberikan sirkulasi udara yang baik. Saat ini sudah banyak daerah yang membangun ruang hijau di pusat kota. Ruang hijau tersebut dapat berupa taman kota hingga hutan kota yang amat bermanfaat untuk pengunjung wisata di kota tersebut. Ruang hijau dapat juga dimanfaatkan untuk aktivitas warga lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki satu Tahura, yakni Tahura Bunder, terletak di Jalan Jogja-Wonosari KM.30, seluas 634,1 hektar. Tahura ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.144/ Menhut-II/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder Seluas 634,10 Ha yang terletak di Kapanewon Playen dan Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 37. Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul

6. Tempat ibadah

Fasilitas yang tidak kalah penting yang harus ada di lokasi wisata adalah tempat ibadah, misalnya saja seperti masjid atau

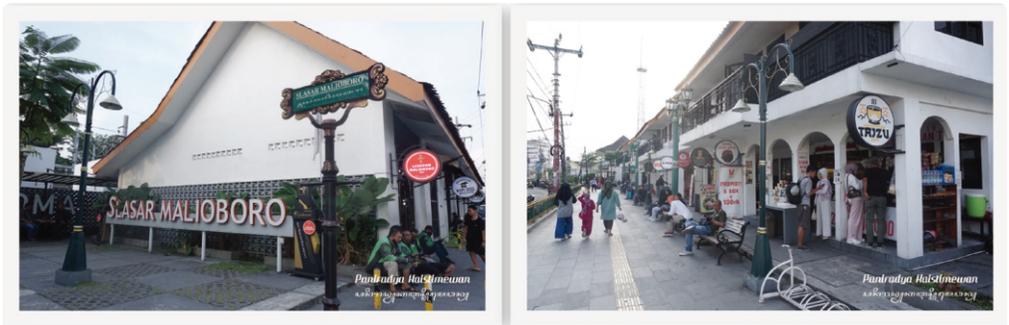
mushola. Dengan adanya musala ini dapat membantu pengunjung muslim yang akan menunaikan ibadah. Musala yang tersedia di tempat wisata ini pun juga harus dijaga kebersihannya, mulai dari tempat mengambil air wudhu hingga karpet yang digunakan di dalam musala atau masjid.

7. Akses yang mudah

Fasilitas selanjutnya adalah ketersediaan akses yang mudah bagi para wisatawan. Misalnya saja kondisi jalan yang baik sehingga nyaman dan memudahkan pengunjung untuk sampai ke tempat wisata tersebut. Kemudian lahan parkir resmi yang luas untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Bisa juga dengan disediakannya angkutan umum yang membawa wisatawan dari tempat parkir menuju spot tertentu yang diinginkan.

8. Area food court

Area wisata yang di dalamnya tersedia area makanan atau *food court* akan semakin lengkap. Biasanya wisatawan yang datang berkunjung, setelah selesai berkeliling tempat wisata, akan merasakan haus atau lapar. Untuk itu, tersedianya fasilitas *food court* ini dapat membantu bagi para wisatawan yang ingin makanan maupun bersantai di area kuliner tersebut.



Gambar 38. Selasar Malioboro Yogyakarta

Penataan kawasan Malioboro agar nyaman dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara mulai digencarkan oleh

Pemerintah Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta. Pedagang lesehan di sepanjang jalan Ahmad Yani (lebih dikenal dengan Malioboro) ditata dan disatukan di Teras Malioboro (teras 1 dan 2).



Gambar 39. Teras Malioboro (dahulu merupakan Gedung bioskop Indra)

Sejak Februari 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang trotoar Malioboro menuju ke tempat khusus yang telah disiapkan di area Teras Malioboro Dua. Relokasi ini bertujuan untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas di kawasan pedestrian serta membuka aksesibilitas Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya sebagai pusat pelayanan kota. Hingga saat ini, terdapat sekitar 1800 PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya. Selain sebagai upaya revitalisasi, relokasi bisa memberikan jaminan bagi para PKL, di antaranya legalitas lokasi usaha, perubahan status informal menjadi formal, program pembinaan, hingga promosi melalui kerja sama dengan pemerintah.

Sosialisasi konsep besar relokasi PKL sudah dimulai dari tahun 2014, bahkan sebelum munculnya kawasan pedestrian di sisi timur Malioboro. Para PKL pada dasarnya dapat

menerima pemindahan tersebut. Mereka berharap relokasi dilakukan terhadap semua pedagang tanpa terkecuali dan lokasi sebelumnya tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar. Tempat relokasi juga diharapkan memiliki kelayakan usaha, daya tampung, mampu menunjang keberlanjutan usaha, dan didukung promosi oleh pemerintah sehingga kegiatan ekonomi bisa tetap berlanjut bahkan meningkat lebih baik.



Gambar 40. Aktivitas pedagang di Teras Malioboro

Jika sejak lama Malioboro dikenal dengan PKL-nya, kesan itu diubah perlahan menjadi tempat pejalan kaki yang cantik, nyaman, dan tertata. Semoga wajah baru Malioboro ini juga dapat menjadi daya tarik buat wisatawan dan memberikan kesan dan kenyamanan bagi wisatawan.

C. Kualitas Paket Wisata Variatif

Industri pariwisata di Indonesia umumnya dan khususnya di D.I. Yogyakarta pada akhir-akhir ini menggambarkan suatu pola yang berkembang pesat. Pendirian perusahaan di bidang pariwisata seperti pendirian biro perjalanan wisata tentu memerlukan strategi serta tenaga-tenaga terampil (SDM) yang berkualitas. Pariwisata merupakan aktivitas pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan

pengalaman perjalanan bagi wisatawan.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi SPA, yakni kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata untuk bidang terapis SPA lingkup DIY yang diikuti oleh 30 orang (peserta), perwakilan dari semua Kabupaten/Kota. Kegiatan dilaksanakan selama tanggal 29 April s/d 2 Mei 2023 (4 hari) di hotel Prime Plaza, Yogyakarta dengan rincian 3 hari pelatihan berupa pemberian teori dan praktik, serta 1 hari uji kompetensi (Yogyakarta, 2023).

Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Terapis SPA dilaksanakan LSP Parsi dan Lembaga Kursus & Pelatihan Putri Kedaton yang sudah berpengalaman dalam bidang terapis SPA. Terapis SPA adalah tugas mulia karena mendukung kesehatan masyarakat, terapis SPA dari desa wisata diharapkan kelak juga menggunakan bahan herbal dari lingkungan sekitar, kembali ke alam, bagian dari penerapan wisata berkelanjutan.

Indonesia tidak hanya jadi destinasi wisata alam dan budaya, tidak sedikit wisman datang ke Nusantara untuk wisata sehat dan mencoba beragam jenis spa. Beda daerah, beda lagi ritual kecantikannya. Hal itu berlaku di Indonesia, yang kaya akan wisata spa tradisional. Ada beberapa daerah di Indonesia yang punya wisata spa, cocok bagi traveler yang ingin berwisata sehat dan pulang mengembalikan kebugaran badan.

Spa merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Wisatawan manca senang dengan masalah-masalah culture spa seperti ini. Spa dan pariwisata memiliki hubungan yang kuat dan saling membutuhkan. Wisatawan butuh relaksasi setelah berwisata, dan spa membutuhkan wisatawan untuk terus berkembang menjadi industri baru yang mampu menunjang perekonomian masyarakat. Prospek spa jika dikaitkan dengan pariwisata sangat bagus. Tiap hotel dan penginapan perlu dibangun spa karena spa

kini sudah menjadi gaya hidup bagi banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. *Javanese* dan *Balinese massage* itu paling banyak dicari wisatawan mancanegara umumnya. Walaupun sebenarnya Indonesia punya banyak *massage* tradisional. Pada dasarnya semua sama, untuk melepaskan otot yang tegang, perbedaannya hanya pada teknik memijat (Apriyono, 2016).

Objek wisata setiap daerah di Indonesia banyak bermunculan yang diikuti oleh kemunculan jasa penyedia layanan untuk berwisata atau yang biasa disebut dengan *tour and travel*. Usaha *tour and travel* ikut serta bermunculan, mulai dari *travel* yang harganya terjangkau sampai dengan yang harganya mahal. Ada pula yang pelayanannya standar sampai dengan pelayanannya eksklusif yang melayani wisata dalam negeri hingga luar negeri. Persaingan pun tidak dapat terelakkan antarbiro. Tujuan objek wisata yang disediakan oleh biro *tour and travel* tergolong lengkap, juga ada tujuan ke objek wisata alami, objek wisata buatan, objek wisata religi, wisata yang memacu ardenalin, dan masih banyak lainnya.

Setiap biro perjalanan wisata memiliki cara tersendiri dalam menarik pelanggan ataupun konsumen untuk menggunakan jasa biro perjalanan mereka. Salah satu upaya untuk meningkatkan bisnis biro perjalanan wisata dan menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung adalah dengan meningkatkan kegiatan promosi, menetapkan harga yang tepat, menambah fasilitas, dan menjaga kualitas pelayanan. Mengelola biro perjalanan wisata secara tepat dan profesional akan meningkatkan serta menjaga kenyamanan wisatawan. Namun, persaingan antarbiro perjalanan wisata yang ketat saat ini membutuhkan kegiatan promosi dan pengelolaan penyedia perjalanan wisata yang baik.

Pengelolaan tersebut sangat dibutuhkan karena pendapatan utama biro perjalanan wisata adalah penyewaan transportasi,

hotel, rumah makan, dan yang kedua adalah fasilitas yang disediakan. Oleh karena semakin ketatnya persaingan biro perjalanan wisata di Yogyakarta, setiap biro akan melakukan pembenahan dari segi manajemen dan pembentukan fasilitas dari biro tersebut sehingga wisatawan nyaman. Kegiatan promosi dan penentuan tarif paket wisata menjadi sangat penting untuk dilakukan. Semakin banyaknya biro perjalanan wisata yang ada di Yogyakarta mendapat respon positif dari masyarakat. Biro perjalanan wisata pun tidak akan jauh dengan nama atau sebutan dari marketing. Karena marketing sendiri adalah jalan jembatan antara penyedia *tour and travel* dan konsumen itu sendiri.

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun. Jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Biro memiliki tujuan utama dalam menetapkan harga yaitu untuk pencapaian keuntungan dan meningkatkan target penjualan.

Penentuan harga juga menjadi penentu konsumen untuk menggunakan jasa biro tersebut. Jika harga yang ditawarkan tinggi tetapi fasilitas yang tidak sesuai dengan harga, hal tersebut dapat mengurangi minat konsumen untuk menggunakan biro tersebut di lain waktu. Menentukan harga paket wisata pada setiap jenis wisata sangat diperlukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang merupakan komponen dalam pembentukan harga paket wisata. Penentuan harga paket wisata berdasarkan metode yang tepat harus dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen biro perjalanan wisata.

Selain promosi, lemahnya perencanaan penyusunan paket wisata dalam suatu destinasi wisata tertentu membuat

wisatawan tidak puas. Ketidakpuasan itu akibat wisatawan kelelahan menikmati paket wisata, atau fasilitas yang dipilih tidak sesuai keinginan dan waktu berwisata yang tidak efisien. Untuk menyusun paket wisata yang tepat dan efisien, perlu identifikasi dan memahami pola perjalanan wisata yang akan berkunjung ke suatu destinasi wisata. Penyusunan paket wisata juga tidak terkekang oleh batas wilayah administrasi kabupaten/kota.

Paket wisata merupakan rencana kegiatan yang disusun secara tetap dengan harga tertentu yang mencakup transportasi, hotel, akomodasi, serta fasilitas perjalanan wisata yang tertera dalam perjanjian paket wisata. Dalam menyusun paket wisata perlu didukung data-data atau informasi tentang daya tarik wisata, hotel dan akomodasi lainnya, restoran dan rumah makan, biro perjalanan wisata atau asosiasi perjalanan wisata, keunikan seni budaya, kuliner khas, cinderamata, tempat hiburan, public amenities (fasilitas publik), event rutin tahunan, spa, bank, kantor polisi, rumah sakit dan informasi lain yang dibutuhkan wisatawan. Jika informasi penyusunan paket wisata lengkap, wisatawan akan dengan mudah mengaksesnya. Misalnya, ketika berwisata di Wediombo, wisatawan harus diberikan informasi dahulu jika di Wediombo tidak ada ATM (anjungan tunai mandiri), sehingga sebelum menuju Wediombo wisatawan sudah menyiapkan uang tunai jika hendak membeli souvenir atau membayar kepentingan wisata lainnya. Penyusunan paket wisata juga perlu memperhatikan sarana pendukung transportasi. Wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta dengan pesawat dapat melalui bandara Adisucipto dan Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.

Penyusunan paket wisata harus betul-betul mampu dijual oleh travel biro. Oleh karenanya, ego wilayah administrasi untuk sementara ditinggalkan dalam menyusun paket. Misalnya, menyusun paket wisata Parangtritis (Bantul)–Prambanan

(Sleman)â€“Mahaloka (Kulon Progo). Jika jeli dalam Menyusun paket wisata yang menarik dan efisien, maka akan laku jual di kalangan biro wisata.



Gambar 41. Mahaloka Paradise Pronosutan, Kembang, Kulon Progo

Potensi wisata di wilayah D.I. Yogyakarta sangat layak jual. Hanya saja, beberapa destinasi wisata belum didukung dengan sarana prasarana memadai. Wisatawan ke salah satu objek wisata di Yogyakarta, tetapi setelah datang ke sana wisatawan tidak puas. Mereka kesulitan melakukan komunikasi karena tidak ada jaringan. Di era saat ini, setelah sampai di lokasi objek wisata, sebagian besar para wisatawan lokal akan melakukan swafoto kemudian segera mengunggah (*upload*) hasil fotonya ke media sosial. Melalui jejaring sosial yang dimiliki, unggahan wisatawan tersebut akan ramai komentar dari relasi pertemanannya.

D. Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan baik lokal maupun internasional. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial,

budaya, alam, dan ilmu. Pariwisata terbagi atas beberapa jenis (Brahmanto, 2015), yaitu: (1) pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*); (2) pariwisata untuk berekreasi (*recreation tourism*); (3) pariwisata untuk budaya (*culture tourism*); (4) pariwisata untuk olah raga (*sport tourism*); (5) pariwisata untuk urusan usaha dagang (*business tourism*); dan (6) pariwisata untuk berkonvensi (*convention tourism*).

Biro perjalanan wisata dalam fungsinya sebagai mediator dan pengelola dari keseluruhan komponen pariwisata yang dibutuhkan oleh wisatawan selama melakukan kegiatan perjalanan wisata harus memperhatikan bahwa produk yang disusunnya dapat memenuhi fungsinya sebagai alat bantu wisatawan. Biro perjalanan membantu dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan istirahat dan bersantai untuk memulihkan kebugaran jasmani dan rohani serta menghilangkan bosan terhadap pekerjaan atau kegiatan rutin. Dengan begitu, dengan berwisata diharapkan dapat mengembangkan *personality*, pengungkapan sikap, mental, fisik, dan spiritual wisatawan. Biro perjalanan wisata seyogyanya juga dapat menempatkan dirinya bukan hanya sebagai perantara saja, melainkan sebagai *partner* perjalanan yang menyenangkan bagi wisatawan atas kepiawaiannya dalam mengelola perjalanan yang mampu memberikan kesan bagus terutama dalam *saving the time and money* dan mampu memberikan rasa aman, nyaman maupun kepuasan wisatawan dalam kegiatan wisata yang dilakukannya.

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta, perlu dilakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Jadi, segmen pasar merupakan penetapan oleh perusahaan secara jelas kelompok-kelompok pasar yang sesuai

untuk dilayani, selain efektif dan efisien melalui kombinasi kebijakan *marketing mix* yang berbeda-beda antara segmen yang satu dengan segmen yang lain.

Untuk menyusun segmentasi pasar dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan geografis dan demografis.

1. Segmentasi geografis

Segmentasi geografis yaitu pengelompokan pasar berdasarkan atas daerah atau wilayah seperti kebangsaan, provinsi, kota, desa, dan sebagainya. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis seperti negara, regional, provinsi, kota, wilayah kapanewon, wilayah kelurahan dan kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografis ini atau beroperasi di semua wilayah tetapi tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan psikologis konsumen. Banyak perusahaan dewasa ini *æmeregionalkanæ* program pemasaran produknya, dengan melokalkan produk, iklan, promosi, dan usaha penjualan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing regional, kota, bahkan kompleks perumahan.

2. Segmentasi demografis

Segmentasi pasar demografis membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi geografi, mobilitas, kepemilikan rumah, pendidikan, agama, ras atau kebangsaan. Faktor-faktor demografis ini merupakan dasar paling populer untuk membuat segmen kelompok konsumen. Paket wisata (*package tour*, *inclusive tour*) diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan satu atau lebih tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual dengan harga tunggal yang menyangkut seluruh

komponen dari perjalanan wisata. Sebelum memahami paket wisata, harus dipastikan apakah dalam rangkaian komponen-komponen wisata tersebut terdapat acara mengunjungi objek/ atraksi wisata. Bila hanya paket perjalanan (transportasi) dan akomodasi saja, tidak dapat dikatakan paket *tour*.

Unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata, untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, antara lain:

- a. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b. Jasa boga dan restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c. Transportasi dan jasa angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
- d. Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
- e. Cenderamata (*souvenir*), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.
- f. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

Untuk menyukseskan pembangunan kepariwisataan di Yogyakarta ada beberapa hal yang harus terus dibangun, seperti pembangunan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah strategi pengembangan destinasi pariwisata terus diimplementasikan untuk pengembangan destinasi pariwisata, di antaranya pengembangan perwilayahan, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, masyarakat, dan investasi. Sebagai penarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta, pengembangan atraksi wisata dilakukan meliputi daya tarik wisata alam, budaya, serta buatan. Produk wisata Indonesia umumnya dan khususnya di Yogyakarta

terbagi menjadi tiga, yakni: wisata alam, budaya, dan buatan.

- a. Produk wisata alam meliputi wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan.
- b. Wisata budaya meliputi wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, serta wisata kota dan desa.
- c. Produk wisata buatan di antaranya wisata *MICE* dan *Event*, wisata olahraga, dan wisata kawasan terintegrasi.

Sementara itu, untuk mempermudah pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dilakukan peningkatan aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi. Pada pengembangan amenities destinasi pariwisata, fokus ditujukan pada pembangunan prasarana umum, penyediaan fasilitas umum, dan pembangunan fasilitas pariwisata. Bukan hanya fasilitas dan aksesibilitas, melainkan juga pengembangan masyarakat dianggap penting dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan masyarakat tersebut meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat.

Untuk mendorong investor berinvestasi pada sektor pariwisata, diperlukan sejumlah strategi di antaranya memberikan insentif, kemudahan, serta melakukan promosi investasi. Semua strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata agar dapat tercipta destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat.

Pengembangan destinasi pariwisata haruslah bertujuan *customer-centric strategy* yang mencakup tiga hal. Pertama, *customer satisfaction* di mana wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan. Kedua, *customer retention/loyalty* di mana wisatawan berkunjung kembali dan loyal dengan destinasi

wisata kita. Ketiga, *customer advocacy* di mana wisatawan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain. Pelaku pariwisata perlu melakukan pengkajian mengapa kunjungan wisatawan dari Jepang mulai berkurang, jika sebelum tahun 2015 wisatawan Jepang adalah yang terbesar berkunjung ke Yogyakarta (Brahmanto, 2015), tapi saat ini kunjungan wisatawan manca terbesar adalah pertama Malaysia, Singapura, Tiongkok dan Amerika Serikat.

Untuk dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan maka perlu melakukan ratifikasi kode etik - kode etik profesi kepariwisataan. Sesuai dengan pasal 14 UU 10/Th2009 tentang Kepariwisataankentuk layanan ini adalah usaha jasa pramuwisata. Fungsi dan tugas pramuwisata dari pengertian tentang *tourist guide*, profesi ini berada di tengah dan memiliki fungsi yang dinamis, menjadi ujung tombak ‘penghubung’ industri pariwisata di mana sejak orang keluar untuk berwisata sejak itu dibutuhkan peran dari tugas-tugas seorang *guide*. Organisasi HPI merupakan salah satu dari 46 anggota asosiasi dunia *World Federation or Tourist Guide Associations* (WFTGA). Fungsi terpenting pemandu wisata adalah menghubungkan wisatawan dengan pusat-pusat ikon destinasi dan khazanah budaya lokal. Seorang *guide* adalah guru, pemimpin, informan, juru terang, wartawan, humas, pemandu, penerjemah, pendamping, penghibur, motivator, seniman bahkan sebagai pekerja budaya.

Profesi *tourist guide* di samping bertugas pokok memandu wisatawan, ia mampu berperan lebih strategis bagi kemajuan industri pariwisata nasional. Dalam sebuah *Konferensi Guide Se-Dunia* di Bali bulan Januari 2011, WFTGA menempatkan asosiasi pada peran ideal juga *marketing system* tidak tergantikan. Diprediksi era mendatang adalah terbukanya akses global pada pariwisata budaya di mana Indonesia menjadi titik penyangga peradaban dunia. Secara individu maupun organ kepeemanduan

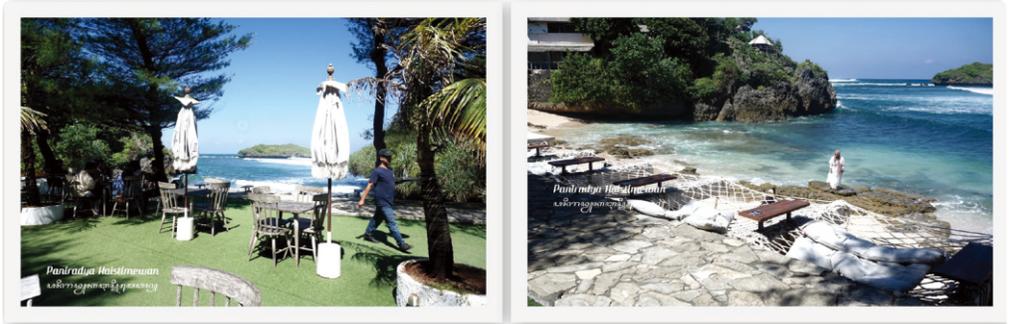
HPI, teknik dan pemberdayaan profesional harus terus ditingkatkan. Selain tugas layanan sesuai Kode Etik Pramuwisata, *guide* menerangkan detail objek wisata serta destinasi lokal pada para wisatawan. Tugas melekat mereka adalah sales *marketer* produk-produk pariwisata. *Guide* juga berperan ikut menjaga daya tarik wisata dari pelaku kerusakan (*fandalisme*), yaitu perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Tugas pemandu wisata dan pengusaha dapat pula dirujuk dalam UU 10/Thn 2009 Pasal 20, bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh: (a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; (b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; (c) perlindungan hukum dan keamanan; (d) pelayanan kesehatan; (e) perlindungan hak pribadi; dan (f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Tergolong “usaha pariwisata risiko tinggi”, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, atau melihat satwa liar di alam bebas. Kondisi wisata ‘telusur goa’ maupun karakteristik pantai yang memiliki risiko bagi kunjungan wisatawan perlu dipersiapkan dengan baik oleh pelaku lapangan terutama tersedianya pemandu wisata khusus.

E. Kesejahteraan Masyarakat Lokal di DTW

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang devisa negara. Pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi di mana dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu

tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Pariwisata merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pariwisata merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang berkaitan dengan cara penggunaan waktu luang atau waktu libur yang dimiliki seseorang.



Gambar 42. Café de Sili Gunungkidul

Pariwisata saat ini sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional Indonesia, bahkan sudah menjadi program prioritas selain bidang industri dan kawasan ekonomi khusus, energi, maritim, dan pangan. Pembangunan di bidang kepariwisataan mendorong untuk meningkatkan kehidupan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dampak pembangunan tercermin dari beberapa aspek, seperti tersedianya peluang usaha yang besar, perubahan tata guna lahan akibat perkembangan struktur ekonomi, seperti pertokoan, warung, restoran, hotel, dan sebagainya.

Dewasa ini para wisatawan banyak menggemari tempat-tempat wisata yang tidak hanya menyajikan keindahan alam saja tetapi juga bisa berinteraksi dengan masyarakat. Objek-objek wisata yang indah dan cantik banyak terdapat di berbagai daerah sehingga menarik wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Selain itu, ada objek wisata yang sama sekali

belum dijamah oleh wisatawan yang tentunya menjadi suatu kebanggaan kita sebagai masyarakat yang harus kita jaga dan lestarikan. Pariwisata yang berkembang di suatu daerah tidak hanya memberikan implikasi bagi peningkatan ekonomi daerah tersebut tetapi juga berimplikasi terhadap sosial budaya dan lingkungan sekitarnya. Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata (Ismaryanti, 2010).

Sektor pariwisata diharapkan dapat menghasilkan *multiplier effect* yang tinggi dalam perekonomian melebihi sektor-sektor unggulan lain. Aktivitas ekonomi yang terdapat pada pariwisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu: wisatawan sebagai masyarakat lokal dan pemerintah. Wisatawan adalah mereka yang membayar untuk menikmati berbagai bentuk kegiatan pariwisata, sedangkan masyarakat adalah mereka yang menikmati manfaat (terutama manfaat ekonomi), dan pemerintah adalah mereka yang menerima pendapatan melalui pajak. Dampak ekonomi adalah salah satunya dampak kegiatan pariwisata yang mudah diukur dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dari sisi ekonomi, tolok ukur yang dapat dikaji adalah penyebab dan proporsi peran pariwisata, antara lain: peningkatan pendapatan total daerah, pendapatan per kapita penduduk, dan perkembangan sektor usaha. Dampak ekonomi dari pariwisata antara lain: perolehan devisa, perolehan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga, distribusi keuntungan, kepemilikan dan perolehan pendapatan pemerintah. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri pariwisata ini diharapkan dapat menambah pemasukan devisa.

Pariwisata pedesaan tentunya berbeda dengan pariwisata

perkotaan, baik dalam hal objek, lokasi, fungsi, skala maupun karakternya. Aspek-aspek seperti peranan desa wisata dalam spesialisasi lokasi dan ketersediaan atraksi dan fasilitas layak mendapat perhatian dalam pengembangan desa-desa wisata yang diharapkan mampu mendukung diversifikasi pedesaan (Bagiana & Yasa, 2017). Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Oleh karena itu, harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Kesadaran ini yang mendorong pemerintah mencari konsep pengembangan wisata baru yang berorientasi pada nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan jangka panjang. Konsep pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan ini. Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti: *sustainable tourism development*, *rural tourism*, *ecotourism*, merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata.

Desa wisata saat ini berupaya menjadikan wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan wisata pedesaan dianggap mampu mendorong sebuah destinasi wisata untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Program desa wisata merupakan program yang dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola kekayaan

baik yang masih menjadi potensi maupun sudah menjadi daya tarik wisata. Namun, pada praktiknya, belum semua masyarakat lokal dapat menerima manfaat dari keberadaan desa wisata yang ada di daerahnya. Dengan kata lain mereka belum dilibatkan maupun diberdayakan secara optimal.

Pengembangan pedesaan mendorong berbagai upaya pelestarian dan pemberdayaan potensi keunikan, berupa budaya lokal (*local wisdom*) masyarakat yang cenderung mengalami ancaman kepunahan akibat arus globalisasi yang memasuki wilayah pedesaan. Desa wisata sebagai salah satu bentuk wisata pedesaan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat kunjungan wisatawan Indonesia dan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak semua bisa dijadikan desa wisata. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi jika ingin menjadikan desa sebagai desa wisata. Priasukmana (2011) menyatakan syarat suatu desa menjadi desa wisata apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) aksesibilitasnya baik sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi; (2) memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata; (3) masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya; (4) keamanan di desa tersebut terjamin; (5) tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai; (6) beriklim sejuk atau dingin; (7) berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas (Priasukmana, 2011).

Dampak tersebut berupa dampak sosial seperti meningkatnya keterampilan penduduk dengan membuat cinderamata, transformasi mata pencaharian dan transformasi

norma. Sementara dari aspek ekonomi ada penyerapan tenaga kerja, mendorong aktivitas berwirausaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, di antaranya: penghasilan masyarakat meningkat, meningkatkan peluang kerja dan berusaha, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi pariwisata. Dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga pangan tidak ditemukan, karena masyarakat Nglageran pada umumnya sebagai petani sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Pembangunan pariwisata yang dilakukan berdampak pada aspek ekonomi di antaranya: (1) terbukanya lapangan pekerjaan baru; (2) berkurangnya tingkat pengangguran; (3) meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; (4) membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat; (5) peningkatan pendapatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan di sektor pariwisata cukup tinggi, meningkatkan penghasilan masyarakat terutama di masa ramainya kunjungan wisatawan, dan keberadaan desa wisata mampu memberi dampak positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mampu menumbuhkan upaya pelestarian nilai-nilai sosial budaya oleh masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Alfana, M. A., Adlina, L., & Rohmah, H. N. (2019). Transisi Demografi di Kabupaten Sleman: Proses dan Analisis Perubahan Struktur Penduduk dalam Satu Dasawarsa Terakhir. *Geomedia*, 75-81.
- Apriyono, A. (2016, Agustus 7). *Spa, Jurus Baru Kemenpar Kenalkan Destinasi Wisata Indonesia*. Retrieved from Liuputan 6: <https://www.liuputan6.com/lifestyle/read/2571212/spa-jurus-baru-kemenpar-kenalkan-destinasi-wisata-indonesia>
- Bagiana, I. G., & Yasa, I. N. (2017). Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1836-1867.
- Brahmanto, E. (2015). Magnet Paket Wisata dalam Menarik Kunjungan Wisatawan Asing Berkunjung ke Yogyakarta. *Jurnal M 338 edia Wisata*, 338-342.
- Fatma, D. (2017, Oktober 27). *5 Klasifikasi Iklim Köppen: Pengertian dan Manfaatnya*. Retrieved Juni 20, 2023, from <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/meteorologi/klasifikasi-iklim-koppen>

- Harriyadi. (2020). Pengaruh Lingkungan dalam Pemilihan Cekungan Wonosari sebagai Hunian pada Masa Awal Sejarah. *Berkala Arkeologi*, 219-242.
- Ismaryanti. (2010). Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo.
- Kurniawan, R. H., Umam, C., Firdausya, M. P., Tyas, S. H., & Qarina, A. Z. (2023). *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023*. Wonosari: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Lestanti, D., Roserina, R., Wintolo, D., Bumi, L. M., & Saputra, I. J. (2022). *Kabupaten Sleman dalam Angka 2022* Sleman: BPS Kabupaten Sleman.
- Murwati, T. (2022). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2022*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta.
- Muslim, B., Widodo, M. H., Widyastuti, G., & Nuraeni, E. (2023). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023* Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Propinsi DIY.
- Nugroho, B. P. (2022). *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul*. Bantul: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul.
- Priasukmana, M. (2011). *Inovasi Desa Wisata : Potensi, Strategi, dan Dampak Kunjungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, P. D., & Sari, N. P. (2019). *Kabupaten Bantul dalam Angka 2019*. Bantul: BPS Kabupaten Bantul.
- Roem, M. (1982). *Tahta untuk rakyat celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Sari, N. P., Rahmawati, P. D., Kuntoro, E., & Wedhaninggar, M. S. (2023). *Kabupaten Bantul dalam Angka 2023*. Bantul: BPS Kabupaten Bantul.
- Setyawan, R., Kushadi, E. P., & Marwati, Y. (2023). *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2023* Wates: BPS Kabupaten Kulon Progo.
- Siruswadi. (2017). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota*

- Yogyakarta tahun 2017 Yogyakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- Statistik, B. P. (2023). *Berita Resmi Statistik*. Yogyakarta: BPS Propinsi D.I Yogyakarta.
- Sudarmadji, Suprayogi, S., Widyastuti, M., & Harini, R. (2011). Konservasi Mata Air Berbasis Masyarakat di Unit Fisiografi Pegunungan Baturagung, Ledok Wonosari, dan Perbukitan Gunung Sewu, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Teknosains*, 42-53.
- Sumini. (2021, September 9). Pandemi Convid-19: Bangkitnya Teori *Malthus*? Retrieved Juni 21, 2023, from <https://cpps.ugm.ac.id/>
- Suwito. (2020). *Pengantar Demografi*. Malang: Ediide Infografika.
- Yogyakarta, D. P. (2023, April 29). *Pelatihan dan Sertifikasi SPA 2023*. Retrieved from Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://visitingjogja.jogjaprovo.go.id/webdinas/43009-pelatihan-dan-sertifikasi-spa-2023/>